

DAFTAR ISI

Contents

LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2020-2024 BIDANG GIZI.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR ISTILAH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan RAD-PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah.....	2
C. Tujuan Penyusunan.....	3
D. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG.....	4
BAB II ANALISIS SITUASI.....	6
A. Situasi Saat Ini.....	6
1. Konsumsi Pangan dibandingkan dengan Kecukupan Gizi	6
2. Pola Makan Masyarakat DIY (pendekatan riset)	15
3. Potensi Pangan Lokal DIY	18
4. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pola konsumsi	22
B. Hambatan atau Permasalahan.....	23
C. Tantangan.....	23
D. Telaah Kebijakan Provinsi Terkait Gizi.....	24
BAB III RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI.....	26
A. Tujuan dan Sasaran (Outcome).....	26
B. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi.....	27
1. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah dalam Situasi Darurat	27
2. Pengarusutamaan Gender	29
C. Pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi.....	29
BAB IV KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI.....	31

A.	Strategi dan Aksi	31
B.	Pengorganisasian	38
C.	Peran Sektor Non-Pemerintah (Swasta dan Lembaga Masyarakat).....	39
D.	Pembiayaan	40
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....		41
A.	Pemantauan dan Evaluasi.....	41
B.	Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.....	41
C.	Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi	41
1.	Pendahuluan.....	41
2.	Indikator dan capaian masing-masing SKPD.....	41
3.	Kendala pencapaian sasaran dan mekanisme penyelesaiannya.....	41
4.	Rencana tindak lanjut dan perencanaan capaian tahun berikutnya	41
5.	Penutup	41
DAFTAR PUSTAKA		42
LAMPIRAN 1. Strategi, Aksi, dan Keluaran Penajaman Program Pangan dan Gizi tahun 2020-2024.....		44
LAMPIRAN 2. Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi di Pusat yang dapat diacu oleh Pemerintah Daerah		78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rerata Konsumsi Kelompok Sayuran dan Olahan per orang per hari (gram) Menurut Kelompok Umur, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014	7
Tabel 2. Proporsi Penduduk yang Mengonsumsi Kelompok Sayur dan Olahan Menurut Kelompok Umur, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014	8
Tabel 3. Angka Kecukupan Zat Gizi Makro—Protein, Lemak, Karbohidrat yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia	13
Tabel 4. Kandungan Zat Gizi Makanan Khas Yogyakarta (Lestari, dkk., 2016)	19
Tabel 5. Outcome RAD-PG Tahun 2021-2024	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pedoman Gizi Seimbang Bagi Masyarakat Indonesia (2014)	8
Gambar 2. Kinerja Konsumsi Pangan Hewani di Prov DI Yogyakarta.....	12
Gambar 3. Kinerja Konsumsi Sumber Pangan Kacang-kacangan di DI Yogyakarta.....	12
Gambar 4. Piring Makanku.....	17
Gambar 5. Indikator kegiatan terdampak pandemic Covid-19 di DIY.....	22

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Rerata Kelompok Sayuran dan Olahan per orang per hari (gram) Menurut Kelompok Umur, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014	7
Grafik 2. Konsumsi Sayuran di DI Yogyakarta (kg/kap/Tahun)	9
Grafik 3. Rata-rata konsumsi buah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per kg per kapita per tahun dari Tahun 2017-2021	10
Grafik 4. Jumlah konsumsi buah-buahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per kg per kapita per tahun dari Tahun 2017-2021	11
Grafik 5. Jumlah Konsumsi Makanan Jenis Karbohidrat per kg/kapita Tahun 2017-2021.....	15

DAFTAR ISTILAH

AKG	: Angka Kecukupan Gizi
B2SA	: Bergizi Beragam Seimbang Aman
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
Dikpora	: Dinas Pendidikan dan Olah Raga
Dinkes	: Dinas Kesehatan
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DMT2	: Diabetes Mellitus Tipe 2
DPKP	: Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan
FAO	: Food and Agriculture Organization
Germas	: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
HPK	: Hari Pertama Kehidupan
Lansia	: Lanjut Usia
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
PGS	: Pedoman Gizi Seimbang
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKK	: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar

PTM	: Penyakit Tidak Menular
RAD-PG	: Rencana Aksi Daerah-Pangan dan Gizi
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
WHO	: World Health Organization

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah serta puji syukur kepada Allah SWT yang atas berkah dan rahmatNya maka Laporan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Bidang Gizi Tahun 2021 telah selesai disusun. Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya dan rencana aksi strategis terkait dengan pangan dan gizi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PD) DIY Tahun 2020-2024. Rencana ini disusun dengan melihat dampak dari Pandemi Covid-19, sehingga potensi kendala capaian disesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

Laporan Analisis Kebijakan RAD-PG DIY Tahun 2020-2024 ini berisi tentang analisis situasi saat ini terkait konsumsi pangan, hambatan, tantangan, telaah kebijakan dengan gizi. Laporan ini menjadi berbeda dengan sebelumnya karena focus nasional adalah situasi darurat dan pengarusutamaan gender. Kami berharap laporan ini menjadi salah satu rujukan bagi OPD terkait untuk pelaksanaan dan outcome yang dapat dicapai. Kami menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penulisan laporan ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna sebagai perbaikan dalam penyusunan laporan seperti ini di masa mendatang. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Yogyakarta, 30 September 2021

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa hal ini sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sejalan dengan perkembangan, saat ini ketahanan pangan dan gizi tidak saja berorientasi pada pangan dan kesehatan, tetapi melibatkan aspek yang lebih luas, sehingga memerlukan keterlibatan multisektor. Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah hasil terbaru dari berbagai penelitian yang menunjukkan fokus perbaikan pangan dan gizi yang paling efektif adalah pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu 270 hari saat janin dalam kandungan dan 730 hari setelah anak lahir atau usia 2 (dua) tahun. Meskipun fokus pada 1000 HPK tetapi perbaikan pangan dan gizi pada periode selanjutnya tetap diperlukan. Hal ini dikarenakan kekurangan gizi pada usia bayi dan balita mengakibatkan rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik, meningkatkan risiko menderita penyakit tidak menular saat dewasa dan lansia, serta berhubungan dengan rendahnya kapasitas kerja fisik saat memasuki usia angkatan kerja, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja.

DIY mempunyai angka pertumbuhan ekonomi yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional selama lima tahun terakhir. Nilai Indeks Pembangunan Manusia DIY juga merupakan tertinggi kedua di tingkat nasional. Di sisi lain, tingkat kemiskinan DIY masih lebih buruk dibandingkan rata-rata nasional. Selain itu, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Indeks Gini juga merupakan yang tertinggi di Indonesia, sehingga ketimpangan pendapatan antara kelompok berpendapatan terendah dan tertinggi di DIY relatif tinggi. Oleh karena itu, pemerintah DIY terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program

yang benar-benar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi DIY secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif ketika memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measurable*), dan berkesinambungan (*sustainability*). Sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan pangan dan gizi sebagai panduan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 63 ayat (3) menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun”. RAD 2020-2024 disusun dengan pendekatan multisektor berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Visi Indonesia dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 misi yang terejawantahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan.

Pembangunan bidang pangan termasuk dalam agenda pembangunan pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dan pembangunan bidang gizi termasuk ke dalam agenda pembangunan ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RAD-PG 2020-2024 ini merupakan dokumen operasional yang menyatukan pembangunan ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas sebagai modal sosial pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya dokumen ini diharapkan dapat dijadikan panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di DIY.

B. Kedudukan RAD-PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para

pengambil kebijakan, menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pangan dan gizi, dan sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai terjemahan dari perencanaan pusat dan daerah, maka kedudukan RAD-PG di daerah sama halnya dengan RAN-PG Tahun 2020-2024 di Pusat. RAD-PG disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan RAN-PG Tahun 2020-2024 dan juga RPJMD di daerah. Dengan demikian kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis khususnya pembangunan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur serta didukung oleh pendanaan yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut maka kedudukan RAD-PG sbb:

1. Kedudukan RAD-PG Multisektor sama halnya dengan RAN-PG Multisektor Tahun 2020-2024.
2. RAD-PG Multisektor harus sejalan dengan RPJMN 2020-2024, RAN-PG Multisektor Tahun 2020-2024, RPJMD DIY serta Rensta SKPD DIY.
3. Kedudukan RAD-PG Multisektor akan menjadi strategis khususnya pembangunan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Penyusunan

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk menyusun Analisis Kebijakan (Draft/Bahan Rancangan Kebijakan) yang dipersiapkan menjadi bahan kebijakan (Peraturan Gubernur) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2020 - 2024.

Tujuan dari pekerjaan ini adalah menyediakan dokumen Draft/Bahan Rancangan Kebijakan) yang dipersiapkan menjadi bahan kebijakan (Peraturan Gubernur) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2020 – 2024 sebagai panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di DIY.

Secara umum tujuan dari penyusunan dokumen analisis kebijakan RAD-PG tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk perbaikan dan pemantapan ketahanan pangan dan gizi.
2. Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah agar:
 - (i) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi;
 - (ii) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal; dan
 - (iii) mampu membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi; dan
 - (iv) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi.
3. Mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pangan dan gizi secara terpadu untuk diimplementasikan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik.
4. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di provinsi DIY dan pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Membangun dan mengoptimalkan lembaga pangan dan gizi di DIY.
6. Sebagai panduan bagi kabupaten/kota dalam menyusun RAD-PG

D. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 142 ayat (5) yang menyebutkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 63 (ayat 3) yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, khususnya pasal 1 ayat (1) yang mengatur ketahanan pangan dan gizi serta Pasal 37 (ayat 1) yang mengatur tentang perbaikan Status Gizi masyarakat.
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022.

BAB II

ANALISIS SITUASI

A. Situasi Saat Ini

Pada bagian ini akan dibahas analisis situasi terkait dengan konsumsi pangan dan potensi pangan lokal di DIY; hasil pembangunan terkait konsumsi di DIY Tahun 2016-2020; kebijakan pembangunan gizi; tantangan dan hambatan dalam upaya pencapaian pembangunan gizi di DIY.

1. Konsumsi Pangan dibandingkan dengan Kecukupan Gizi

a. Konsumsi Sayur

Sayur adalah bahan makanan yang berasal dari bagian tumbuhan seperti daun, batang, dan bunga (Sediaoetomo, 2004). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014), sayur merupakan daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, polong atau bijian, dan sebagainya yang dapat dimasak.

Rerata tertinggi penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengonsumsi sayuran dan olahan adalah jenis sayuran daun sebesar 65,5 gram per hari. Persentase penduduk yang mengonsumsi bahan makanan kelompok sayuran dan olahan berupa sayuran daun sebesar 85%. Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa konsumsi sayuran tertinggi pada kelompok usia 19-55 Tahun, dengan rerata konsumsi total untuk sayuran sebesar 74,2 gram. Kelompok usia yang reratanya paling rendah dalam mengonsumsi sayuran adalah kelompok usia di bawah 1 tahun, dengan konsumsi sebesar 25 gram per hari (Sugianto et al., 2014). Data tersebut masih relevan digunakan karena survey ini menyoroti konsumsi dengan metode yang sesuai dan dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data konsumsi sayur juga diambil dari Grafik 2 mengenai konsumsi sayur di DIY yang datanya berisi konsumsi bawang merah, kentang, cabai, dan bawang putih. Pada Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI), kentang merupakan sumber karbohidrat dan bawang-bawangan serta cabai masuk ke dalam bumbu sehingga perlu pengkajian jika data yang diambil adalah dari kelompok bahan makanan tersebut yang tidak masuk ke dalam kelompok sayuran.

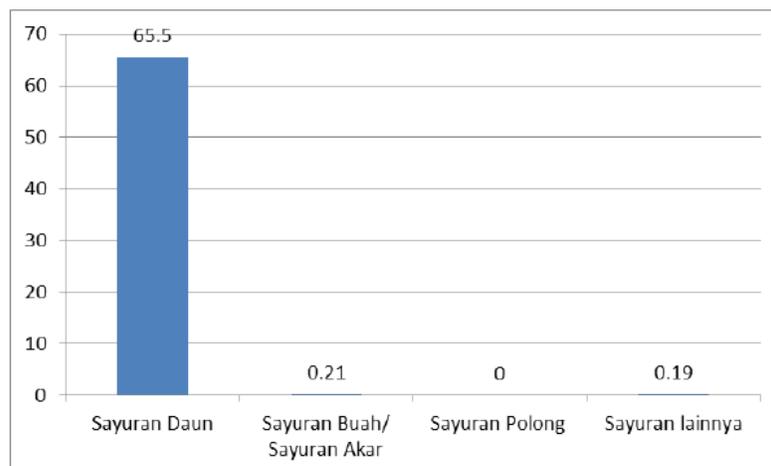
Menurut pedoman gizi seimbang, konsumsi sayur yang dianjurkan dalam satu hari adalah 3-4 porsi (Gambar 1). Seperti contoh konsumsi bayam satu porsi adalah 100 gram. Jika dianalogikan atau dicontohkan bahwa konsumsi sayuran daun salah satunya adalah bayam, maka rerata konsumsi tertingginya pada kelompok usia 19-55 Tahun adalah sebesar 73,6 gram. Jumlah tersebut hanya memenuhi 21% dari anjuran 3-4 porsi. Padahal konsumsi sayur dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan serat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi optimal.

Tabel 1. Rerata Konsumsi Kelompok Sayuran dan Olahan per orang per hari (gram) Menurut Kelompok Umur, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

Kelompok Umur	Jenis Sayuran dan olahan (g)									
	Sayuran Daun		Sayuran Buah/ Sayuran Akar		Sayuran Polong		Sayuran lainnya		Total	
	Rerata	SD	Rerata	SD	Rerata	SD	Rerata	SD	Rerata	SD
0 – 59 bln	25,0	29,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0	29,4
5 – 12 thn	44,9	58,2	0,30	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	58,1
13 – 18 thn	52,0	49,3	0,58	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6	49,9
19 – 55 thn	73,6	67,7	0,24	2,47	0,00	0,18	0,36	3,74	74,2	69,6
> 55 thn	69,7	63,6	0,02	0,23	0,00	0,00	0,01	0,22	69,7	63,6
Semua umur	65,5	64,2	0,21	2,42	0,00	0,13	0,19	2,70	65,9	65,3

(Sumber: Survei Diet Total, 2014)

Grafik 1. Rerata Kelompok Sayuran dan Olahan per orang per hari (gram) Menurut Kelompok Umur, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

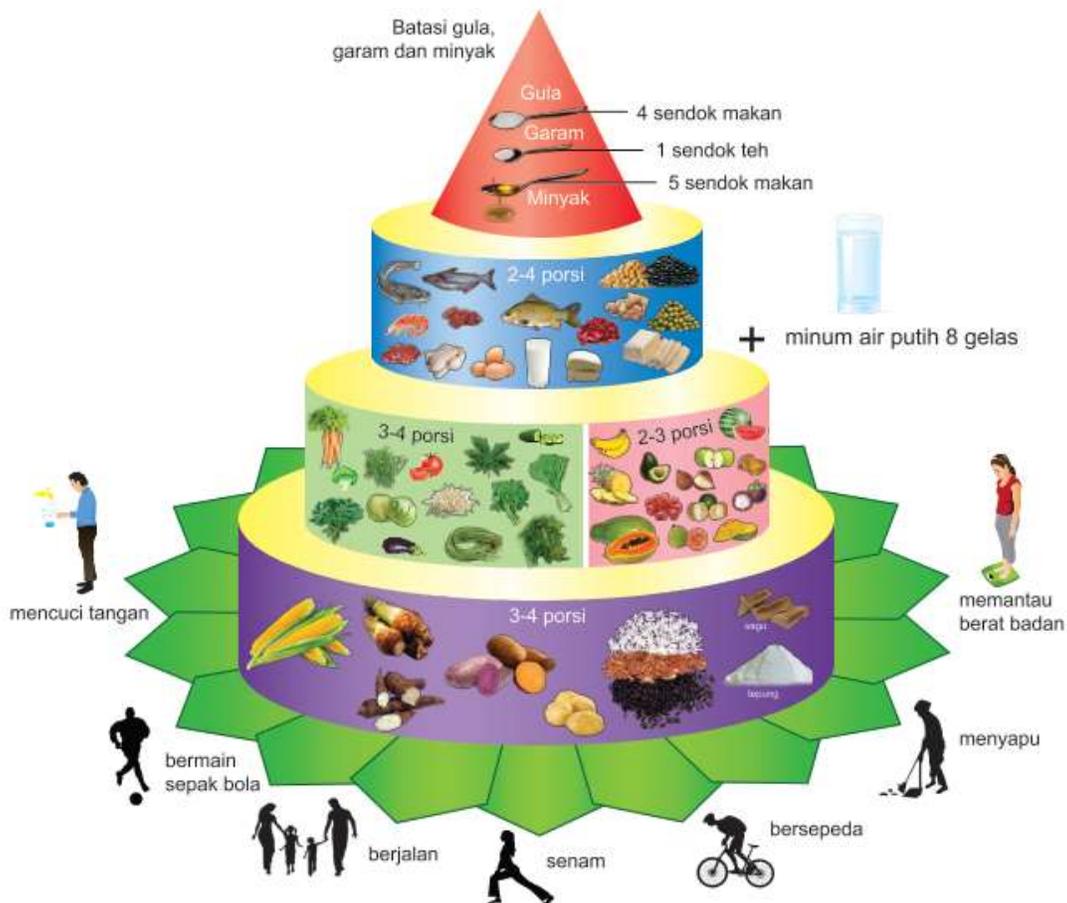


(Sumber: Survei Diet Total, 2014)

Tabel 2. Proporsi Penduduk yang Mengonsumsi Kelompok Sayur dan Olahan Menurut Kelompok Umur, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

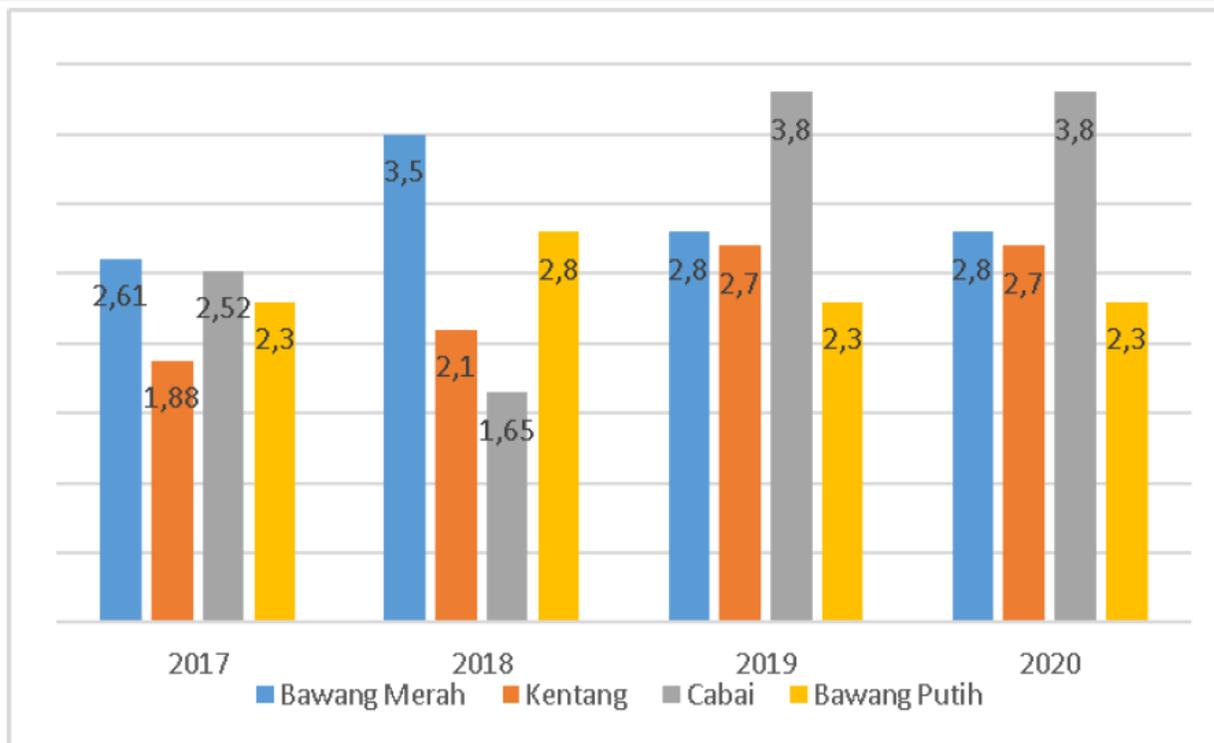
Kelompok Umur	Jenis Sayuran dan olahannya			
	Sayuran Daun	Sayuran Buah/ Sayuran Akar	Sayuran Polong	Sayuran lainnya
0 – 59 bln	64,6	0,0	0,0	0,0
5 – 12 thn	67,1	3,6	0,0	0,0
13 – 18 thn	85,8	1,2	0,0	0,0
19 – 55 thn	89,4	1,1	0,0	1,5
> 55 thn	86,6	0,5	0,0	0,5
Semua umur	85,0	1,2	0,0	0,9

(Sumber: Survei Diet Total, 2014)



Gambar 1. Pedoman Gizi Seimbang Bagi Masyarakat Indonesia (2014)

Grafik 2. Konsumsi Sayuran di DI Yogyakarta (kg/kap/Tahun)



Sumber: DPKP DIY, 2020

b. Konsumsi Buah

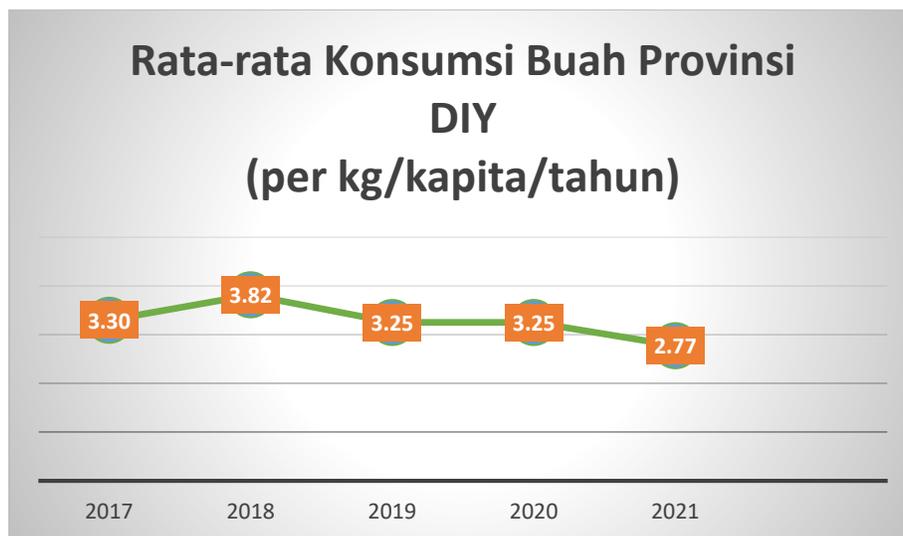
Buah merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik dan biasanya berbiji. Selain itu, buah dapat diartikan sebagai bagian dari tanaman yang strukturnya mengelilingi biji dimana struktur tersebut berasal dari indung telur atau sebagian dari bunga itu sendiri (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014).

Dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebanyak 3.668.719 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Rata-rata konsumsi buah pada Tahun 2020 3,25 kg/kapita/tahun, maka rata-rata konsumsinya adalah 8,87 gram. Padahal menurut Pedoman Gizi Seimbang, konsumsi harian untuk buah adalah 2-3 porsi (Gambar 1), sebagai contoh konsumsi pisang yang dianjurkan adalah 80-120 gram (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Pisang termasuk salah satu buah dengan konsumsi yang tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Konsumsi pisang pada Tahun 2020 adalah 8,4 kg/kapita/tahun, maka rata-rata konsumsinya adalah 22,95

gram (Grafik 3). Konsumsi satu porsi yang dianjurkan untuk pisang adalah 40 gram, maka rata-rata konsumsinya hanya memenuhi kurang dari 1 porsi.

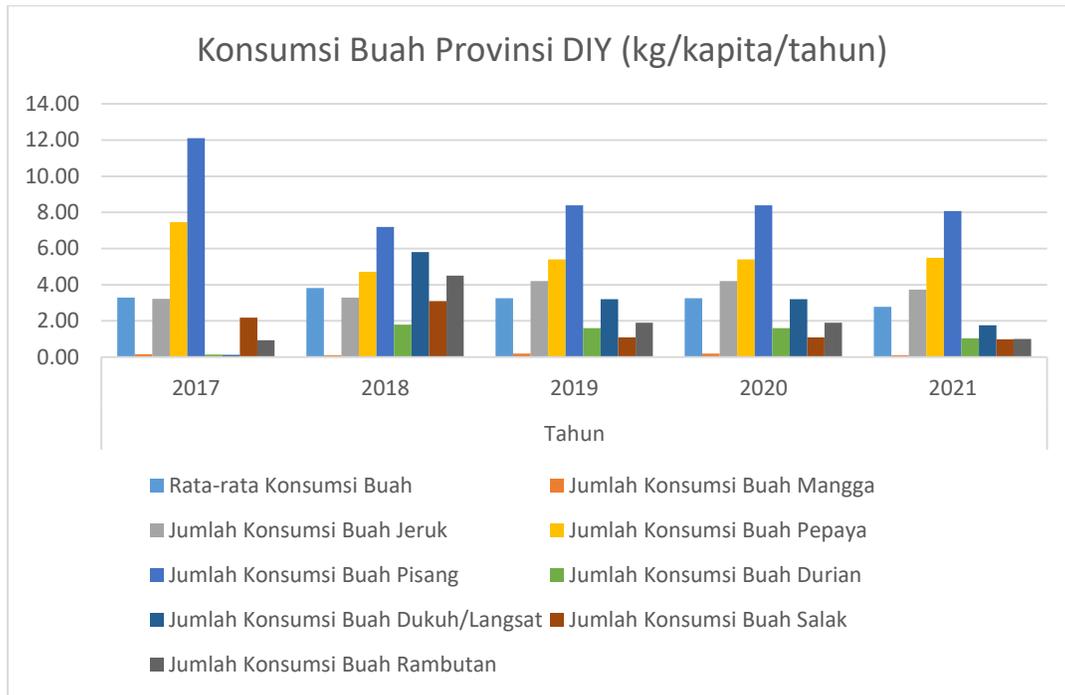
Jenis buah-buahan yang banyak dikonsumsi masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain pisang, pepaya, dan jeruk. Selain itu, buah-buahan yang dikonsumsi adalah dukuh/langsat, salak, rambutan, manga, dan durian dalam jumlah fluktuatif. Berbagai macam buah-buahan tersebut menunjukkan konsumsi yang beragam dari Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilihat dari Grafik 2 dan 3, maka kualitas konsumsinya sudah cukup baik, namun secara kuantitas masih harus diupayakan untuk secara minimal memenuhi anjuran dari Kementerian Kesehatan RI. Beragam buah lokal dapat tumbuh subur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti pisang dan pepaya. Yogyakarta juga dikenal sebagai salah satu kota penghasil buah salak yang berada di kawasan Kecamatan Kaliurang, Kabupaten Sleman.

Grafik 3. Rata-rata konsumsi buah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per kg per kapita per tahun dari Tahun 2017-2021



(sumber: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/114-jumlah-konsumsi) Data diolah

Grafik 4. Jumlah konsumsi buah-buahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per kg per kapita per tahun dari Tahun 2017-2021



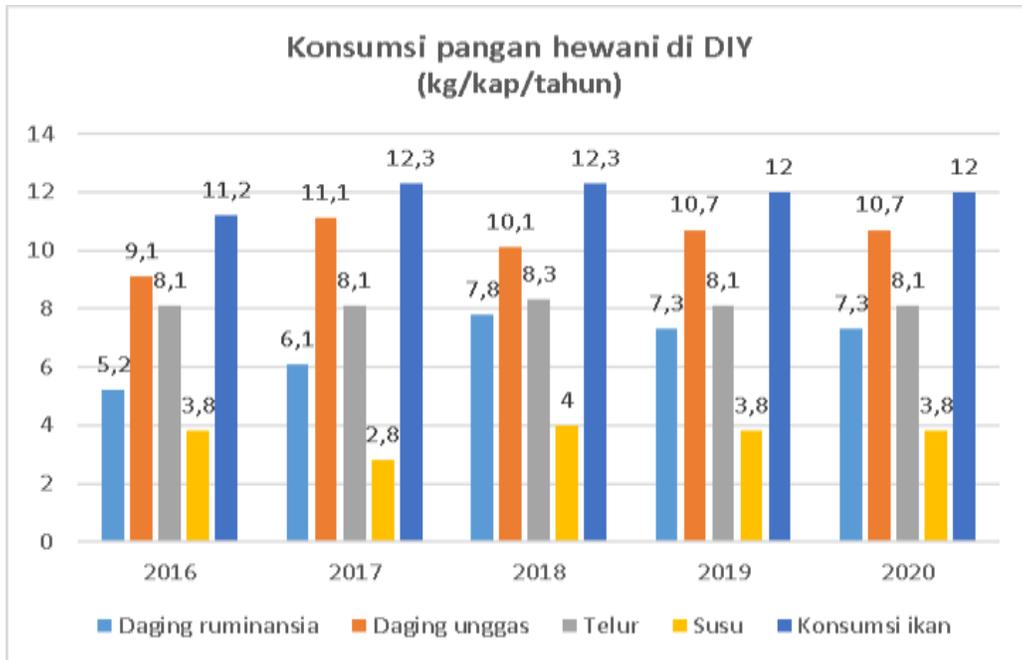
(sumber: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/114-jumlah-konsumsi) Data diolah

c. *Konsumsi Lauk (Protein)*

Protein adalah salah satu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah makro atau banyak. Pangan hewani yang datanya tersedia pada Survei Ketahanan Pangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daging sapi, daging ayam, telur, susu, dan ikan.

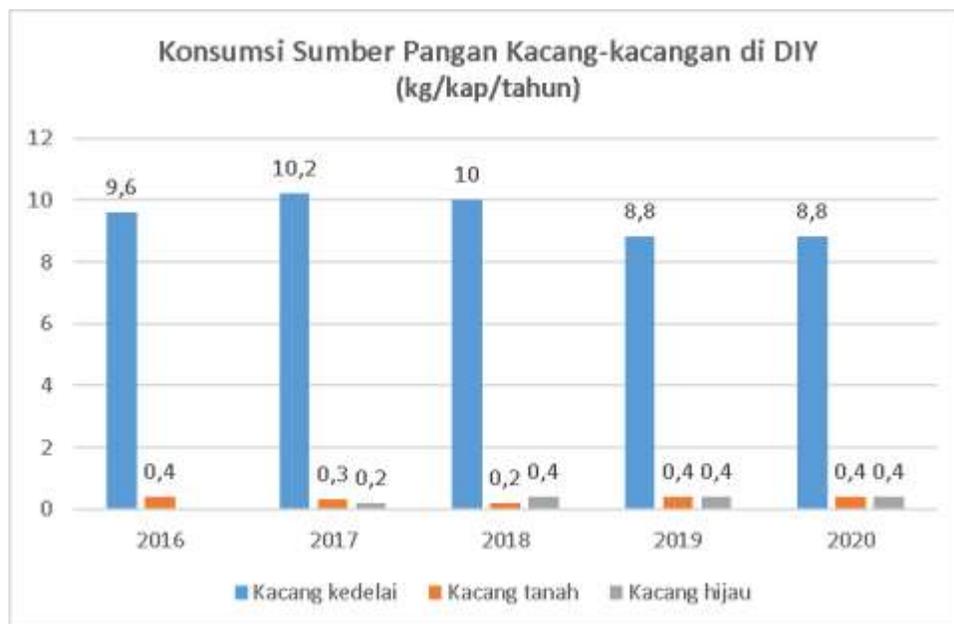
Menurut PGS, konsumsi protein adalah 2-4 porsi setiap hari dan bisa didapatkan dari protein hewani dan nabati. Akan tetapi, kualitas protein lebih tinggi pada protein hewani karena kandungan asam amino yang lebih lengkap (Hardinsyah, 2018).

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa konsumsi harian daging ruminansia, unggas, telur, susu, dan ikan adalah 19,95 g; 29,23 g; 22,13 g; 10,38 g, 32,79 g. Lebih lanjut dapat dilihat dari Gambar 3 yakni konsumsi harian kacang kedelai sebanyak 24,04 g. Pada standar porsi, berat 1 porsi ayam adalah 55 g, telur 55 g, susu 200 ml atau 30 g, ikan segar 40 g, dan kacang kedelai sebesar 25 g. Maka jika sesuai dengan PSG, konsumsi harian minimal untuk telur (contoh) adalah 110-220 g. Konsumsi telur harian adalah 22,13 g, maka masih jauh dari minimal porsi yang dianjurkan.



Gambar 2. Kinerja Konsumsi Pangan Hewani di Prov DI Yogyakarta

Sumber: BPS DIY (2021)



Gambar 3. Kinerja Konsumsi Sumber Pangan Kacang-kacangan di DI Yogyakarta

Sumber: BPS DIY (2021)

Tabel 3. Angka Kecukupan Zat Gizi Makro—Protein, Lemak, Karbohidrat yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia

Kelompok Umur	Berat Badan (kg)	Tinggi Badan (cm)	Energi (kkal)	Protein (g)	Lemak (g)			Karbohidrat (g)	Serat (g)	Air (ml)
					Total	Omega 3	Omega 6			
Bayi / Anak										
0 – 5 bulan ¹	6	60	550	9	31	0.5	4.4	59	0	700
6 – 11 bulan	9	72	800	15	35	0.5	4.4	105	11	900
1 – 3 tahun	13	92	1350	20	45	0.7	7	215	19	1150
4 – 6 tahun	19	113	1400	25	50	0.9	10	220	20	1450
7 – 9 tahun	27	130	1650	40	55	0.9	10	250	23	1650
Laki-laki										
10 – 12 tahun	36	145	2000	50	65	1.2	12	300	28	1850
13 – 15 tahun	50	163	2400	70	80	1.6	16	350	34	2100
16 – 18 tahun	60	168	2650	75	85	1.6	16	400	37	2300
19 – 29 tahun	60	168	2650	65	75	1.6	17	430	37	2500
30 – 49 tahun	60	166	2550	65	70	1.6	17	415	36	2500
50 – 64 tahun	60	166	2150	65	60	1.6	14	340	30	2500
65 – 80 tahun	58	164	1800	64	50	1.6	14	275	25	1800
80+ tahun	58	164	1600	64	45	1.6	14	235	22	1600
Perempuan										
10 – 12 tahun	38	147	1900	55	65	1.0	10	280	27	1850
13 – 15 tahun	48	156	2050	65	70	1.1	11	300	29	2100
16 – 18 tahun	52	159	2100	65	70	1.1	11	300	29	2150
19 – 29 tahun	55	159	2250	60	65	1.1	12	360	32	2350
30 – 49 tahun	56	158	2150	60	60	1.1	12	340	30	2350
50 – 64 tahun	56	158	1800	60	50	1.1	11	280	25	2350
65 – 80 tahun	53	157	1550	58	45	1.1	11	230	22	1550
80+ tahun	53	157	1400	58	40	1.1	11	200	20	1400
Hamil (+an)										
Trimester 1			+180	+1	+2.3	+0.3	+2	+25	+3	+300
Trimester 2			+300	+10	+2.3	+0.3	+2	+40	+4	+300
Trimester 3			+300	+30	+2.3	+0.3	+2	+40	+4	+300
Menyusui (+an)										
6 bln pertama			+330	+20	+2.2	+0.2	+2	+45	+5	+800
6 bln kedua			+400	+15	+2.2	+0.2	+2	+55	+6	+650

¹ Pemenuhan kebutuhan gizi bayi 0-5 bulan bersumber dari pemberian ASI Eksklusif

² Energi untuk aktifitas fisik dihitung menggunakan faktor aktifitas fisik untuk masing-masing kelompok umur yaitu 1.1 bagi anak hingga umur 1 tahun, 1.14 bagi anak 1-3 tahun, dan 1.26 bagi anak dan dewasa 4-64 tahun, serta 1,12 bagi usia lanjut

d. Konsumsi Makanan Pokok (Karbohidrat)

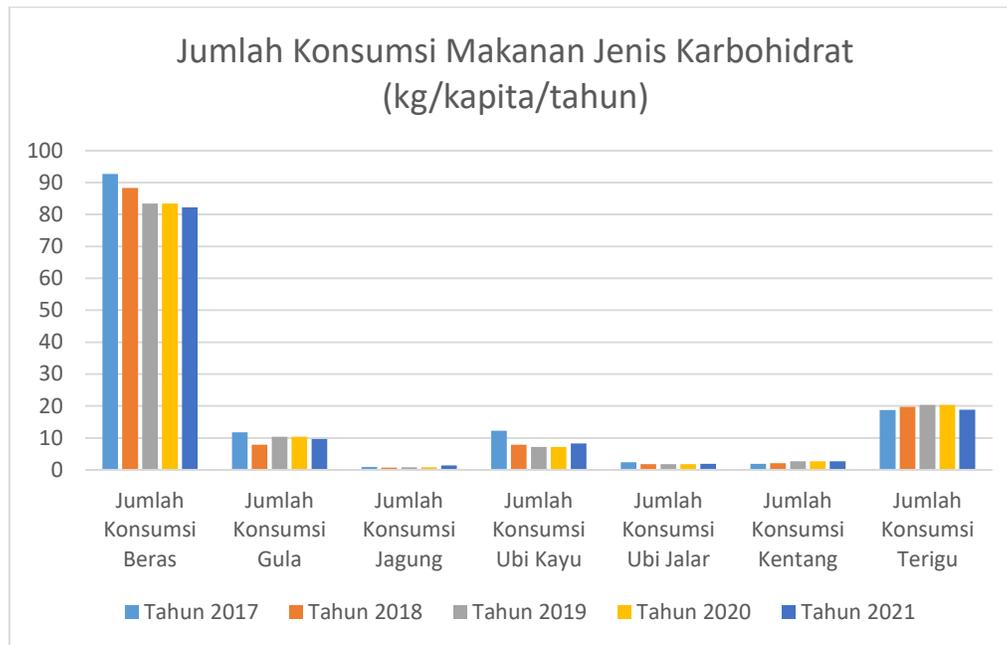
Pangan local yang termasuk dalam karbohidrat antara lain jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kentang. Konsumsi jagung pada Tahun 2020 adalah sebesar 0,8 kg per kapita per tahun. Konsumsi ubi kayu sebesar 7,2 kg per kapita per tahun. Konsumsi ubi jalar sebesar 1,8 kg per kapita per tahun. Konsumsi kentang 2,7 kg per kapita per tahun. Hal

ini berarti bahwa konsumsi harian dari jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kentang secara berturut-turut adalah 2,19 gram; 19,67 gram; 4,92 gram; dan 7,38 gram. Konsumsi karbohidrat masyarakat DIY utamanya didapatkan dari beras, gula, dan tepung, dengan konsumsi harian sebesar 227,87 gram; 28,42 gram; dan 55,46 gram.

Dapat dibandingkan dengan PGS anjuran konsumsi 3-4 porsi (Gambar 1), yang jika dicontohkan dari konsumsi beras maka anjuran harian adalah sebanyak 300-400 gram. Apabila dibandingkan dengan angka kecukupan gizi untuk Karbohidrat (Tabel 3), maka konsumsi yang dianjurkan sebanyak 415 gram untuk dewasa laki-laki dan 340 gram. Namun jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi, maka harus dihitung jumlah kandungan karbohidrat dari setiap makanan, yang kurang lebih dapat dilihat dari PGS. Konsumsi per kapita untuk beras memang masih di bawah anjuran PGS, namun kebiasaan mengonsumsi selingan berbahan dasar tepung menjadi penambahan jumlah asupan harian. Konsumsi gula yang mencapai hampir 30 gram atau 3 sendok makan juga dapat menjadi perhatian mengingat batas konsumsi maksimal adalah 4 sendok makan setiap hari.

Konsumsi bahan makanan pokok selain beras, yakni gandum, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kentang merupakan bahwa masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya terbatas pada nasi (beras). Hal tersebut merupakan potensi bahwa masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengonsumsi beraneka ragam makanan, karena Prinsip Gizi Seimbang adalah makan yang beranekaragam. Tidak ada makanan atau bahan pangan yang sempurna, semuanya saling melengkapi. Sebagai contoh, beras yang merupakan makanan pokok, kurang akan asam amino (protein) triptofan, tetapi asam amino tersebut tinggi pada jagung. Sehingga sangat penting untuk mengonsumsi aneka ragam makanan (Almatsier, 2006; Hardinsyah, 2018)

Grafik 5. Jumlah Konsumsi Makanan Jenis Karbohidrat per kg/kapita Tahun 2017-2021



(sumber: http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/cetak/114-jumlah-konsumsi) Data diolah

2. Pola Makan Masyarakat DIY (pendekatan riset)

Pola makan penting untuk menunjukkan bagaimana kondisi nyata dari makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sejak diperkenalkan Pedoman Gizi Seimbang, maka pesan 4 sehat 5 sempurna sudah diperbaiki dalam segi pola makan, terutama konsumsi susu yang masuk dalam protein hewani. Kuantitas juga menjadi sorotan dari PGS karena jumlah porsi yang dimakan penting untuk mencukupi kebutuhan gizi seseorang. Jumlah porsi ini juga bisa menentukan pola makan seseorang, misalnya mengonsumsi 200 g papaya dalam sehari, maka terhitung 2 porsi sehingga mencukupi kecukupan sehari orang dewasa yakni 2-4 porsi atau pola makan buah 2 kali sehari.

Pola makan juga berkaitan dengan kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan beragam baik untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit, terutama Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung coroner, kanker, dan obesitas. Penelitian Marfitarini (2009) menunjukkan bahwa konsumsi sayur dan

buah 5-7 kali per minggu selama kehamilan dapat mencegah timbulnya hipertensi. Konsumsi susu 1 gelas per hari selama kehamilan dapat menurunkan risiko hipertensi sebanyak 2,545 kali karena kandungan kalsium dan magnesium yang mempunyai efek berkebalikan dengan natrium dalam menjaga pembuluh darah.

Asupan serat yang didapat dari buah, sayur, serta gandum utuh diteliti dapat mencegah peningkatan glukosa darah dan mengontrolnya tetap normal (Susanto, 2011 dalam Susetyowati, 2019). Seseorang yang mengonsumsi serat dari sumber sayur dan buah secara rutin sesuai porsi yang dianjurkan dapat menurunkan risiko pra-diabetes. Serat termasuk dalam jenis karbohidrat yang susunannya kompleks sehingga mempunyai metabolisme yang berbeda dengan karbohidrat sederhana atau biasa dikenal dengan gula atau glukosa (Gropper, Sareen S. Smith, 2013). Penyerapan serat terjadi lebih lambat karena mempunyai indeks glikemik yang rendah sehingga menghambat peningkatan glukosa dalam darah (Lestari dkk., 2013 dalam Susetyowati, 2019)

Penelitian Susetyowati (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara frekuensi konsumsi makanan berlemak dengan kejadian tingginya kolesterol dan *Low Density Lipoprotein* (LDL) atau dikenal dengan lemak jahat; dan juga rendahnya *High Density Lipoprotein* (HDL) yang dikenal dengan lemak baik. Kejadian ini terjadi baik di desa maupun di kota. Frekuensi konsumsi tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yakni sering (>1x per hari atau 1x per hari), kadang-kadang (1-2x per minggu atau 3-6x per minggu), dan jarang (<3x per bulan atau tidak pernah). Penelitian Song (2016) menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara konsumsi kopi dengan peningkatan LDL atau trigliserida. Lain halnya dengan penelitian meta-analisis Cai (2012) dan Grosso (2014) yang menyebutkan bahwa asupan kopi (terutama yang tidak disaring) malah menyebabkan kenaikan kolesterol total, LDL, dan trigliserida.

Penelitian Dandamudi dkk. (2018) merupakan studi literature yang membahas 17 artikel penelitian terkait hubungan pola makan dengan risiko kanker payudara. Hasil dari kumpulan artikel penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsumsi sayur yang konsisten terbukti memiliki efek pencegahan atau proteksi terhadap risiko kanker payudara, sedangkan konsumsi lemak jenuh dan makanan atau daging olahan secara konsisten berhubungan dengan peningkatan risiko kanker payudara.

Penelitian Obirikorang (2016) menunjukkan konsumsi makanan berhubungan dengan pencegahan Obesitas. Dari hasil penelitian diketahui bahwa konsumsi makanan selingan pada

waktu makan utama, makan saat tengah malam, kurangnya aktivitas fisik, tingginya asupan makanan cepat saji, dan konsumsi alcohol berkaitan erat dengan kejadian obesitas (Susetyowati, 2019). Penelitian Therdtatha (2021) menunjukkan pola makan orang obesitas yang kaya lemak akan mempengaruhi sedikitnya mikrobiom (bakteri) di dalam tubuh, dan orang yang banyak mengonsumsi karbohidrat maka mempunyai banyak mikrobiom yang menjadikan rentan terkena Diabetes Mellitus Tipe 2 (DMT2). Penelitian (Syagata, 2019) juga menunjukkan pola konsumsi yang tinggi energy berkaitan dengan risiko DMT2 pada pegawai.

Bukti kuat yang menunjukkan bahwa pola makan sangat berkaitan erat dengan kesehatan menjadikan informasi penting yang harus diberikan kepada masyarakat. Pesan PGS yang sudah menggantikan 4 sehat 5 sempurna juga seharusnya sudah melekat kuat di masyarakat karena PGS ini menjadi dasar untuk mengonsumsi makanan baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga harapannya masyarakat terbiasa makan sehat dengan melihat Piring Makanku (Gambar 4) yang menjadi bagian dari pesan PGS.



Gambar 4. Piring Makanku

Sumber: Pedoman Gizi Seimbang (2014)

3. Potensi Pangan Lokal DIY

Makanan tradisional adalah produk makanan dari suatu daerah yang dibuat secara tradisional, dalam arti proses pembuatannya dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana. Pada umumnya, makanan tradisional menggunakan bahan-bahan local dengan biaya yang relative kecil dan merupakan resep turun-temurun. Bahan-bahan local yang berarti mudah didapatkan di daerah setempat dan menjadi ciri khas suatu daerah. Yogyakarta dikenal sebagai kota yang masih sangat kental dengan budaya daerah, begitu pula dengan makanan tradisionalnya. Bahkan, sector kuliner Yogyakarta menjadi daya tarik local bagi banyak orang dari pelosok wilayah, baik dalam maupun luar negeri (Arsanti, dkk., 2016). Dari penjelasan ini, terlihat bahwa pangan local mempunyai banyak potensi manfaat.

Pangan local Khas Yogyakarta juga mempunyai potensi sebagai pangan yang memenuhi syarat gizi. Berdasar kajian makanan bergizi adalah makanan yang kaya akan protein (tinggi protein), dan atau memenuhi kebutuhan karbohidrat (tinggi karbohidrat), dan atau rendah lemak karena dapat memicu penyakit. Pada Tabel 4 disebutkan 56 makanan baik selingan maupun makanan utama dengan kandungan gizi makro (Protein, Lemak, dan Karbohidrat). Beberapa makanan yang menjadi potensi tinggi protein antara lain Ampyang, Peyek Mbok Tumpuk, Bakpia, Tempe dan Tahu Bacem Kaliurang, Mento, Sagon, Nasi Gudeg, Nasi Merah Lengkap Wonosari, Mi Jawa, Lotek, Soto Kadipiro, Sate Jamur, Ayam Goreng, Gurami, Belut Goreng, Sate Karang, Sate Klathak, Sambel Goreng, dan Brongkos. Dari makanan-makanan tersebut, konsumsinya harus hati-hati karena mempunyai kandungan lemak yang setara bahkan lebih tinggi dari proteinnya, yakni Ampyang, Peyek, Tahu Bacem, Sagon, Nasi Gudeg, Mi Jawa, Lotek, Gudangan, Sate Jamur, Ayam Goreng, Belut Goreng, Sate Klathak, Sambel Goreng, dan Brongkos.

Data menarik ditunjukkan dari **Bubur Garut** dan **Bubur Gempol** yang mempunyai kandungan lemak dan energy yang rendah, sehingga jika mempunyai penyakit yang harus membatasi keduanya, makanan tersebut dapat dijadikan sebagai alternative. Nasi gudeg sangat dikenal di Yogyakarta, jika melihat kandungan gizinya, maka konsumsinya harus hati-hati karena 1 piring dapat memenuhi hampir setengah kecukupan energy harian (40,28%) dengan kandungan lemak yang juga cukup tinggi. Walaupun lotek merupakan makanan sehat karena berisi sayuran, namun juga harus hati-hati karena kandungan lemaknya yang cukup tinggi (58.07%). Kerjasama dengan LIPI dari pengembangan pangan local juga dapat ditingkatkan.

Tabel 4. Kandungan Zat Gizi Makanan Khas Yogyakarta (Lestari, dkk., 2016)

No	Nama Makanan	Takaran Saji satuan (g)	Takaran saji per makan (g)	Kandungan BM per 100 g				Kandungan BM per sajian				Persen AKG			
				Energi	Prot	Lemak	KH	Energi	Prot	Lemak	KH	Energi	Prot	Lemak	KH
1	Ampyang	30	120	488.32	13.66	22.39	58.04	585.98	16.39	26.87	69.65	22.98%	25.22%	38.38%	16.78%
2	Geplak	25	25	420.12	5.23	12.97	70.62	105.03	1.31	3.24	17.66	4.12%	2.01%	4.63%	4.25%
3	Peyek Mbok Tumpuk	125	125	581.72	19.4	40.67	34.52	727.15	24.25	50.84	43.15	28.52%	37.31%	72.63%	10.40%
4	Manggleng	30	30	436.35	5.74	12.62	74.95	130.91	1.72	3.79	22.49	5.13%	2.65%	5.41%	5.42%
5	Ukel	15	15	459.66	7.33	17.45	68.32	68.95	1.10	2.62	10.25	2.70%	1.69%	3.74%	2.47%
6	Banjar	10	10	559.01	9.61	36.76	47.43	55.90	0.96	3.68	4.74	2.19%	1.48%	5.25%	1.14%
7	Yangko	15	150	323.86	2.5	0.03	78.4	485.79	3.75	0.05	117.60	19.05%	5.77%	0.06%	28.34%
8	Kembang Waru	35	35	331.31	8.24	5.07	63.18	115.96	2.88	1.77	22.11	4.55%	4.44%	2.54%	5.33%
9	Geblek	15	150	324.39	0.54	6.81	65.24	486.59	0.81	10.22	97.86	19.08%	1.25%	14.59%	23.58%
10	Bakpia	25	100	312.35	7.09	7.21	54.76	312.35	7.09	7.21	54.76	12.25%	10.91%	10.30%	13.20%
11	Bubur Garut	140	200	60.98	0.87	0.13	14.08	121.96	1.74	0.26	28.16	4.78%	2.68%	0.37%	6.79%
12	Bubur Gempol	150	200	73.62	1.24	0.6	15.81	147.24	2.48	1.20	31.62	5.77%	3.82%	1.71%	7.62%
13	Jadah Manten	50	100	167.11	4.48	1.18	34.64	167.11	4.48	1.18	34.64	6.55%	6.89%	1.69%	8.35%
14	Wajik Kaliurang	35	35	257	4.18	1.33	57.09	89.95	1.46	0.47	19.98	3.53%	2.25%	0.67%	4.81%
15	Jadah Kaliurang	35	35	246.85	4.31	10.07	34.75	86.40	1.51	3.52	12.16	3.39%	2.32%	5.04%	2.93%
16	Tempe Bacem Kaliurang	35	70	215.18	12.27	7.02	25.73	150.63	8.59	4.91	18.01	5.91%	13.21%	7.02%	4.34%
17	Tahu Bacem Kaliurang	80	80	228.35	15.18	10.69	17.85	182.68	12.14	8.55	14.28	7.16%	18.68%	12.22%	3.44%
18	Legomoro	40	40	210.83	5.22	2.47	41.93	84.33	2.09	0.99	16.77	3.31%	3.21%	1.41%	4.04%
19	Lupis	65	65	157.39	2.4	0.13	36.66	102.30	1.56	0.08	23.83	4.01%	2.40%	0.12%	5.74%
20	Mata Kebo	45	45	234.82	4.9	0.55	52.57	105.67	2.21	0.25	23.66	4.14%	3.39%	0.35%	5.70%

No	Nama Makanan	Takaran Saji satuan (g)	Takaran saji per makan (g)	Kandungan BM per 100 g				Kandungan BM per sajian				Persen AKG			
				Energi	Prot	Lemak	KH	Energi	Prot	Lemak	KH	Energi	Prot	Lemak	KH
21	Growol	175	175	162.45	0.92	0.43	38.73	284.29	1.61	0.75	67.78	11.15%	2.48%	1.08%	16.33%
22	Getuk	70	140	201.46	1.79	1.18	45.92	282.04	2.51	1.65	64.29	11.06%	3.86%	2.36%	15.49%
23	Ongol-ongol	60	100	198.03	0.79	2.41	43.28	198.03	0.79	2.41	43.28	7.77%	1.22%	3.44%	10.43%
24	Lemet	65	65	241.18	1.44	4.31	49.16	156.77	0.94	2.80	31.95	6.15%	1.44%	4.00%	7.70%
25	Gatot	160	160	166.8	1.14	1.02	38.26	266.88	1.82	1.63	61.22	10.47%	2.81%	2.33%	14.75%
26	Tiwul	150	150	210.65	1.44	1.7	47.41	315.98	2.16	2.55	71.12	12.39%	3.32%	3.64%	17.14%
27	Kipo	30	30	261.4	3.97	8.15	43.04	78.42	1.19	2.45	12.91	3.08%	1.83%	3.49%	3.11%
28	Jongkong	60	60	145.67	1.23	0.09	34.99	87.40	0.74	0.05	20.99	3.43%	1.14%	0.08%	5.06%
29	Mento	50	100	175.7	7.5	5.94	23.04	175.70	7.50	5.94	23.04	6.89%	11.54%	8.49%	5.55%
30	Grontol	100	100	141.56	3.27	3.34	24.59	141.56	3.27	3.34	24.59	5.55%	5.03%	4.77%	5.93%
31	Caranggesing	100	100	111.49	4.53	1.09	20.89	111.49	4.53	1.09	20.89	4.37%	6.97%	1.56%	5.03%
32	Sanggabuwana	65	65	257.89	9.73	15.74	19.33	167.63	6.32	10.23	12.56	6.57%	9.73%	14.62%	3.03%
33	Tempe Benguk Besengek	20	60	126.31	8.68	4.38	13.04	75.79	5.21	2.63	7.82	2.97%	8.01%	3.75%	1.89%
34	Sagon	180	180	303.41	16.23	6.73	44.48	546.14	29.21	12.11	80.06	21.42%	44.94%	17.31%	19.29%
35	Nasi Gudeg	475	475	216.26	8.37	9.95	23.32	1027.24	39.76	47.26	110.77	40.28%	61.17%	67.52%	26.69%
36	Gudheg Manggar	600	600	144.49	12.21	4.71	13.32	866.94	73.26	28.26	79.92	34.00%	112.71%	40.37%	19.26%
37	Nasi Merah Lengkap Wonosari	550	550	142.93	8.07	4.86	16.73	786.12	44.39	26.73	92.02	30.83%	68.28%	38.19%	22.17%
38	Mi Pentil	90	180	166.39	0.61	3.05	34.11	299.50	1.10	5.49	61.40	11.75%	1.69%	7.84%	14.79%
39	Mi Lethek Matang	400	400	222	3.39	8.01	34.1	888.00	13.56	32.04	136.40	34.82%	20.86%	45.77%	32.87%
40	Mi Lethek Mentah	90	90	359.05	0.94	0.49	87.72	323.15	0.85	0.44	78.95	12.67%	1.30%	0.63%	19.02%

No	Nama Makanan	Takaran Saji satuan (g)	Takaran saji per makan (g)	Kandungan BM per 100 g				Kandungan BM per sajian				Persen AKG			
				Energi	Prot	Lemak	KH	Energi	Prot	Lemak	KH	Energi	Prot	Lemak	KH
41	Mi Jawa	400	400	215.96	5.98	7.94	30.14	863.84	23.92	31.76	120.56	33.88%	36.80%	45.37%	29.05%
42	Lotek	510	510	193.97	4.9	7.97	25.66	989.25	24.99	40.65	130.87	38.79%	38.45%	58.07%	31.53%
43	Gudangan	275	275	106.86	4.79	6.17	8.04	293.87	13.17	16.97	22.11	11.52%	20.27%	24.24%	5.33%
44	Soto Kadipiro	580	580	105.67	4.68	1.61	18.13	612.89	27.14	9.34	105.15	24.03%	41.76%	13.34%	25.34%
45	Sate Jamur	275	275	206.81	4.65	5.31	35.1	568.73	12.79	14.60	96.53	22.30%	19.67%	20.86%	23.26%
46	Tongseng Jamur	200	200	228.24	4.33	4.86	41.78	456.48	8.66	9.72	83.56	17.90%	13.32%	13.89%	20.13%
47	Soto Pak Sholeh	430	430	105.39	3.12	2.61	17.36	453.18	13.42	11.22	74.65	17.77%	20.64%	16.03%	17.99%
48	**Ayam Goreng Kalasan (Ny. Suharti)	290	120	270.52	28.36	14.5	6.64	324.62	34.03	17.40	7.97	12.73%	52.36%	24.86%	1.92%
49	Ayam Goreng Bacem (Mbok Sabar)	260	120	238.3	21.71	11.06	12.98	285.96	26.05	13.27	15.58	11.21%	40.08%	18.96%	3.75%
50	Gurami***	300	65	198.34	24.2	11.23	0.13	128.92	15.73	7.30	0.08	5.06%	24.20%	10.43%	0.02%
51	Sambal Belut	30	30	206.31	21.52	7.63	12.89	61.89	6.46	2.29	3.87	2.43%	9.93%	3.27%	0.93%
52	Belut Goreng	200	35	n/a	29.58	20.81	n/a	#VALUE!	10.35	7.28	#VALUE!	#VALUE!	15.93%	10.41%	#VALUE!
53	Sate Karang	415	415	144.17	6.09	1.79	25.91	598.31	25.27	7.43	107.53	23.46%	38.88%	10.61%	25.91%
54	Sate Klathak	145	145	n/a	13.68	17.27	n/a	#VALUE!	19.84	25.04	#VALUE!	#VALUE!	30.52%	35.77%	#VALUE!
55	Sambel Goreng Printil	285	285	131.2	11.39	7.46	4.62	373.92	32.46	21.26	13.17	14.66%	49.94%	30.37%	3.17%
56	Brongkos Tempel	400	400	162.99	9.97	8.64	11.34	651.96	39.88	34.56	45.36	25.57%	61.35%	49.37%	10.93%

Catatan:

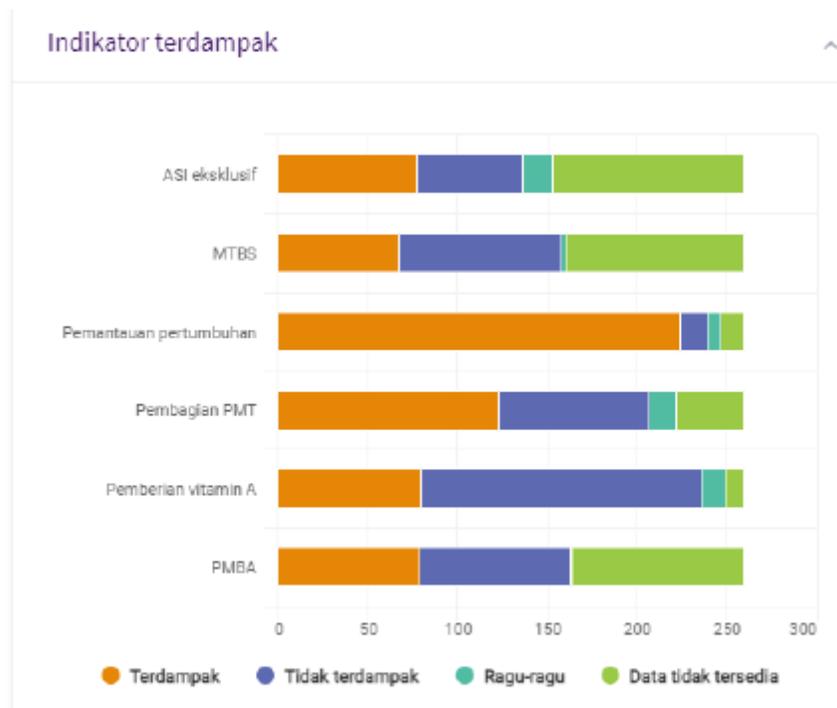
*AKG untuk laki-laki usia 30-49 Tahun

** Bagian Dada Atas

*** Bagian Badan

4. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pola konsumsi

Berdasarkan kajian Dinkes (2020) terhadap respon masyarakat mengenai Covid-19 ini menjadi gambaran bahwa masyarakat sudah paham dari situasi darurat yang terjadi sehingga WHO menyebut sebagai pandemic. Protokol kesehatan sudah diupayakan untuk dilakukan oleh masyarakat. Namun, kondisi mengharuskan adanya pembatasan social yang awalnya berupa PSBB menjadi PPKM yang berkaitan dengan ekonomi terutama daya beli yang terjadi di masyarakat. Daya beli yang berhubungan dengan kualitas konsumsi dari masyarakat tentu berhubungan dengan kesehatan. Menurut penelitian jaringan pangan dan gizi, sebagian besar wilayah DIY mengalami dampak gizi dan kesehatan tingkat sedang, dengan indicator yang paling banyak mengalami gangguan atau hambatan yakni aspek pemantauan pertumbuhan.



Gambar 5. Indikator kegiatan terdampak pandemic Covid-19 di DIY

Sumber: <http://jpg-indonesia.net/>

B. Hambatan atau Permasalahan

Hambatan yang dapat ditemui dari kajian Analisis Situasi antara lain:

1. Konsumsi sayur yang masih kurang dari segi kuantitas.
2. Konsumsi buah-buahan yang masih kurang dari segi kuantitas.
3. Konsumsi protein yang berasal dari pangan hewani dan nabati yang masih kurang dari segi kuantitas.
4. Konsumsi ikan di DIY masih tergolong kurang, sedangkan konsumsi daging masuk dalam kategori lebih.
5. Informasi mengenai PGS yang sudah menggantikan 4 sehat 5 sempurna belum tersosialisasi dengan baik, padahal penting untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan beragam sesuai dengan pesan PGS nomor 1, yakni konsumsi makanan yang beraneka ragam.
6. Penerapan PSBB atau PPKM menjadi kendala bagi kegiatan terkait distribusi hingga konsumsi perlu menjadi perhatian.
7. Pengembangan pangan local padahal kaya gizi di Kulon Progo dan Gunung Kidul dengan dukungan yang terbatas

C. Tantangan

Tantangan yang dihadapi DIY terkait pangan bergizi antara lain:

1. Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengonsumsi beragam buah-buahan.
2. Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengonsumsi beragam pangan sumber protein, baik dari hewani maupun nabati.
3. Konsumsi sumber pangan pokok yang beragam.
4. Potensi pangan local yang dapat dibudidayakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan bisa menjadi sumber pangan local yang kaya akan zat gizi.
5. Penyebaran informasi mengenai pola makan bergizi dan beragam seimbang dan aman (B2SA) melalui sms blast atau social media yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
6. Kondisi pandemic membuat masyarakat banyak mengakses social media

7. Riset pengembangan pangan di daerah berpotensi yang dapat mengatasi masalah kesehatan, seperti stunting.

D. Telaah Kebijakan Provinsi Terkait Gizi

Kebijakan nasional yang menunjang gizi, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan alinea ke IV tentang kewajiban Negara Indonesia melindungi seluruh bangsa Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penggunaan Beras Reguler untuk Korban Bencana
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia
15. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis
16. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang

17. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
18. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 876/MENKES/SK/XI/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain
21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 224/MENKES/SK/II/2007 tentang Spesifikasi Teknis Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)
22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/MENKES/SK/X/2009 tentang Spesifikasi Teknis Makanan Tambahan Anak Balita 2-5 Tahun, Anak Usia Sekolah Dasar, dan Ibu Hamil

Kebijakan Provisi dan daerah yang terkait gizi antara lain:

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari ((Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017)
Kegiatan utama GERMAS nomor 3 adalah penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi yang berkaitan dengan penyusunan RAD Pangan dan Gizi.
2. Peraturan Gubernur tentang RAD Pencegahan dan Penanganan Stunting Tahun 2020-2024 (Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020)
3. Instruksi Bupati Bantul tentang Penggunaan Bahan Baku Pangan Lokal dalam Kegiatan (Bantul, 2012)

Kebijakan-kebijakan ini penting untuk diketahui OPD terkait bahkan masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan terkait dapat dilaksanakan dengan lebih mudah karena adanya dukungan kebijakan.

BAB III

RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

A. Tujuan dan Sasaran (Outcome)

Outcome yang ingin dicapai dari upaya perbaikan pangan dan gizi secara umum tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Outcome RAD-PG Tahun 2021-2024

No	Indikator	Baseline (2020)	Target				Instansi Penanggung- jawab
			2021	2022	2023	2024	
<i>Outcome Antara</i>							
1	Ketersediaan Beras (ton)	535.940	535.940	535.940	535.940	535.940	DPKP
2	Ketersediaan Pangan Hewani (ton)	438,189	438,189	438,189	438,189	438,189	DPKP
3	Skor Pola Pangan Harapan	94,7	94,8	95,00	95,10	95,20	DPKP
4	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	3.735	3.735	3.735	3.735	3.735	DPKP
5	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	107,97	107,97	107,97	107,97	107,97	DPKP
6	Jumlah desa rawan pangan (desa)	4	4	4	3	3	DPKP
7	Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	25,48	26,05	26,57	27,10	27,64	DKP
8	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	DPKP
12	Konsumsi telur dan susu (gram/ kapita/hari)	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	DPKP
13	Konsumsi sayur dan buah (gram/ kapita/hari)	249,2	249,3	249,4	249,6	249,7	DPKP

14	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	78	80	82	84	86	BPOM
Outcome							
1	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,4	21,1	18,4	16	14	Dinkes
2	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	8,4	7,8	7,5	7,3	7	Dinkes

B. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

1. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah dalam Situasi Darurat

Gizi juga berperan penting saat terjadinya situasi darurat, antara lain bencana alam, kebakaran, dan atau pandemic Covid-19 yang saat ini terjadi. Dampak akibat bencana umumnya secara fisik adalah rusaknya atau terhambatnya berbagai sarana dan prasarana fisik seperti pemukiman, bangunan fasilitas pelayanan umum, dan sarana transportasi. Namun demikian, dampak yang lebih besar adalah timbulnya permasalahan kesehatan, termasuk gizi pada kelompok masyarakat yang terkena dampak bencana akibat rusaknya sarana pelayanan kesehatan, terputusnya jalur distribusi pangan, rusaknya sarana air bersih, dan sanitasi lingkungan yang buruk.

Dalam hal ini, gizi mempunyai peranan antara lain:

- (1) mensosialisasikan pedoman penanganan gizi dalam penanggulangan bencana
Kegiatan ini dilakukan dengan menyediakan pedoman penanganan gizi terkait kebutuhan penanggulangan bencana dan mensosialisasikannya ke petugas dan pihak yang terlibat sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) melakukan pengkajian cepat atau *Rapid Health Assessment (RHA)*-Gizi
Pengkajian cepat terhadap indikator terkait gizi diperlukan sebagai bahan yang dapat memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan gizi dan kesehatan. Pengkajian ini dilakukan oleh tim klaster gizi baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
- (3) menyediakan buffer stock MP-ASI, PMT Bumil, dan PMT Anak Sekolah\

Penyediaan ini berupa makanan pabrikan yang sudah ditentukan standar distribusi dan pemberiannya dalam penanggulangan bencana. Penyediaan ini dilakukan oleh tim klaster gizi sesuai panduan yang berlaku.

- (4) menyusun menu dan merencanakan kebutuhan bahan makanan dapur umum

Hal ini penting dilakukan oleh tim gizi. Dapur umum melakukan penyelenggaraan makanan banyak (lebih dari 50 porsi) yang merupakan tanggung jawab Kementerian Sosisal. Dapur umum menyiapkan makanan bagi pengungsi atau terdampak agar tidak lapar dan memenuhi kebutuhan gizinya. Dapur umum bertujuan untuk menyediakan makanan sesuai kebutuhan gizi, higienis, aman, dan dapat didistribusikan dalam waktu yang cepat dan tepat. Penyusunan menu dan perhitungan kebutuhan makanan juga penting untuk dilakukan. Perlengkapan dapur umum secara sederhana juga merupakan factor yang penting untuk diperhatikan.

- (5) menyusun menu dan merencanakan kebutuhan bahan makanan untuk kelompok rentan
Kelompok rentan yang dimaksud adalah bayi dan anak balita, ibu hamil dan menyusui, dan lanjut usia yang syaratnya mengacu pada AKG Indonesia yang berlaku dan mempertimbangkan hal penting pada syarat penyusunan menu makanan bencana.

- (6) menyelenggarakan dapur khusus bayi dan anak balita darurat.

Penyelenggaraan makanan bayi dan anak balita merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makanan kepada bayi dan anak balita, dalam rangka pencapaian status kesehatan yang optimal dengan pengawasan ahli gizi.

- (7) melakukan konseling menyusui, MP-ASI, dan PMBA

Konseling ini tetap dilakukan agar kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi (di bawah 12 bulan), dan anak (12-24 bulan) tetap terpenuhi dalam situasi darurat. Konseling dilakukan konselor atau tenaga terlatih dan dapat dilakukan di mana saja di tempat pengungsian.

- (8) surveilans Gizi

merupakan kegiatan pengamatan secara teratur dan terus menerus terhadap status gizi masyarakat sebagai dasar untuk membuat keputusan dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat. Pengamatan keadaan gizi masyarakat juga penting dilakukan pada keadaan darurat.

- (9) melakukan pengawasan bantuan susu formula, kental manis, dan produk bayi lainnya
- (10) melakukan pengawasan donasi dan bantuan pangan lainnya
- (11) membuat standar porsi dan gizi pengungsi

Standar porsi dan gizi bagi masyarakat yang terkenda dampak situasi darurat mempertimbangkan AKG yang berlaku di Indonesia, syarat penyusunan menu makanan bencana, sesuai situasi kedaruratan diutamakan mengatasi rasa lapar, cepat, dan tepat, dan kelompok rentan diberikan perlakuan khusus.

- (12) mobilisasi sumber daya untuk menunjang kegiatan sub kluster gizi

2. Pengarusutamaan Gender

Pengarustamaan gender sudah masuk dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, juga Perda DIY Nomor 7 Tahun 2018. Kesetaraan gender menjadi pembahasan penting untuk masyarakat, dimana pengertiannya adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social, budaya, dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Gender dalam penyediaan konsumsi terutama di rumah tangga menjadi hal menarik yang perlu dikaji. Sudah menjadi stigma masyarakat bahwa ibu yang menjadi *center* dalam kegiatan dapur mulai dari merencanakan menu hingga memastikan semua anggota keluarganya makan, bahkan sampai menyuapi anak. Padahal kita kenal juga *chef* banyak yang seorang laki-laki dimana keuletan dalam pengolahan masakan hingga penyajian yang menarik menjadi factor penting dalam mengonsumsi makanan. Penelitian (Elida & Fridayati, 2011) mengenai sikap dan kebiasaan ibu yang mempunyai gizi buruk menunjukkan bahwa keduanya bukan factor yang menyebabkan terjadinya gizi buruk. Berdasarkan data prevalensi, yang termasuk kelompok rentan kebanyakan adalah perempuan, mengapa perempuan juga menjadi penting dalam pencegahan gizi. Sehingga menjadi penting bahwa peran keluarga, yakni ibu dan ayah, seharusnya memberikan peran penting untuk konsumsi yang bergizi seimbang dan beragam juga aman di keluarga, termasuk kelompok rentan yang ada di dalamnya. Pesan ini juga tentu penting untuk disebarkan ke masyarakat.

C. Pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Tujuan strategis tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya dimana tujuan strategis ini dapat terjadi jika dilaksanakan secara kolaboratif antara berbagai pihak. RAD-PG merupakan panduan

distribusi tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program tersebut. Strategi dan aksi tersebut dikelompokkan dalam 4 tujuan strategis

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman
3. Peningkatan pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi (esensial)
4. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi

BAB IV

KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI

A. Strategi dan Aksi

Organisasi kesehatan dunia atau WHO dan Organisasi Pangan Dunia atau FAO merekomendasikan pentingnya integrasi sistem pangan dan orientasi kepada penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan hingga tingkat rumah tangga. Terdapat enam aksi yang bisa dilakukan yaitu: (1) Sistem pangan yang kokoh dan berkelanjutan untuk konsumsi makanan yang bergizi; (2) integrasi pangan dan sistem kesehatan untuk menjamin akses pelayanan esensial; (3) jaminan sosial dan pendidikan gizi; (4) Investasi untuk perbaikan gizi; (5) lingkungan yang aman dan mendukung untuk pemenuhan gizi pada semua sasaran; (6) Penguatan tata kelola dan akuntabilitas sistem pangan dan gizi. Berdasarkan rekomendasi tersebut, disusun tujuan strategis dan aksi di bidang pangan dan gizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

No	Strategi	Aksi
Tujuan Strategis 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman		
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan
		Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga

No	Strategi	Aksi
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);	<p>Meningkatkan kerja sama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan</p> <p>Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan</p> <p>Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan</p> <p>Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka keamanan pangan asal ikan</p> <p>Penguatan kapasitas industri olahan pangan skala kecil dalam rangka penjaminan keamanan pangan dan peningkatan kandungan gizi produk pangan olahan</p>
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	<p>Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kab/kota</p> <p>Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)</p>
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (<i>food loss</i>)	<p>Mengembangkan pertanian modern (<i>smart farming</i>) untuk mengurangi <i>food loss</i></p> <p>Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait</p> <p>Melakukan pendampingan pemanfaatan limbah olahan makanan</p> <p>Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i></p>
1.5	Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan

No	Strategi	Aksi
Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman		
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	<p>Memanfaatkan panel harga pangan sebagai early warning system (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan</p> <p>Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal</p>
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;	<p>Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan</p> <p>Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan</p>
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;	Membina UMKM dan Koperasi Pertanian dalam pengembangan usaha untuk mendukung ketahanan pangan melalui rantai pasok untuk menghindari kelangkaan pangan
2.4	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	<p>Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras bifortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)</p> <p>Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Kartu Sembako/BPNT</p> <p>Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)</p> <p>Melakukan peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) Akseptor KB Mandiri Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Lestari MKJP</p>

No	Strategi	Aksi
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan <i>supplier</i> bahan pangan lokal di daerah masing-masing
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting
		Mendampingi daerah rentan pangan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi
2.7	Pengembangan sistem logistik pangan	Mengembangkan sistem logistik pangan melalui penguatan <i>supply chain ecosystem</i> berdasarkan kondisi daerah
Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)		
3.1	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah beserta pemanfaatannya
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun;	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;	Meningkatkan kegiatan advokasi penganeekaragaman konsumsi pangan
		Melakukan kerjasama dengan <i>influencer</i> , tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku
		Melakukan pengutamaan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)
		Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan

No	Strategi	Aksi
		<p>Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik</p> <p>Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90</p> <p>Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan</p> <p>Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini</p> <p>Melakukan <i>orientasi agent of change</i> pencegahan penyakit tidak menular (PTM)</p>
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	<p>Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan nilai gizi dalam label kemasan pada UMKM pangan olahan</p> <p>Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah</p>
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan	Perluasan cakupan kelompok sasaran siklus hidup dan rentan pangan yang terpenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu	Cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 6 bulan di Kabupaten/Kota

No	Strategi	Aksi
	Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal	Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	<p>Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 pada tahun 2024</p> <p>Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat</p> <p>Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM</p> <p>Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa</p> <p>Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta) terdampak pandemi COVID-19</p> <p>Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste</p> <p>Meningkatkan penyehatan lingkungan dan penerapan pola hidup sehat masyarakat</p> <p>Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak</p>
3.9	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	<p>Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas K/L/D dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi</p> <p>Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku</p>
3.10	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.	Mendorong peningkatan produk pangan segar dan pangan olahan bersertifikat

No	Strategi	Aksi
Tujuan Strategis 4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi		
4.1	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan <i>stunting</i>
		Memperkuat peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-PG di Provinsi dan Kabupaten/Kota
4.2	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi di daerah
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> .
4.3	Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini
		Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
		Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, <i>acceptibilitas</i> , harga, <i>shelf live</i>) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi

No	Strategi	Aksi
4.5	Pengembangan <i>platform</i> penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> termasuk inovasi <i>smart farming</i>
		Pelaksanaan penelitian trans disiplin dan/atau lintas institusi terkait pencegahan dan penanganana <i>stunting</i> pada perguruan tinggi di DIY
		Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro
		Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan
		Menyelenggarakan forum nasional penelitian dan pengembangan pangan dan gizi secara berkala
		Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga
		Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah <i>stunting</i> yang sudah beredar

B. Pengorganisasian

Program-program intervensi pemantapan ketahanan pangan dan gizi di DIY akan dilaksanakan secara *collaborative actions* dari lembaga-lembaga yang terkait. RAD-PG merupakan panduan distribusi tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota membentuk forum koordinasi untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Forum koordinasi yang dimaksud adalah menggunakan forum koordinasi yang sudah ada seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau membentuk forum koordinasi baru yang sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di daerah. Forum dapat dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah. Sedangkan keanggotaan melibatkan seluruh

perangkat daerah terkait dan dapat juga menambahkan pemangku kepentingan lainnya di bidang pangan dan gizi.

C. Peran Sektor Non-Pemerintah (Swasta dan Lembaga Masyarakat)

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah atau swasta dan lembaga masyarakat juga berperan untuk melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi. Sektor non pemerintah dan lembaga masyarakat yang dapat mengambil peran adalah perguruan tinggi, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, dan media.

Perguruan tinggi dapat mendukung pencapaian target perbaikan pangan dan gizi melalui pelaksanaan riset operasional dan penyebarluasan informasi pangan dan gizi terkini kepada mahasiswa, terutama calon tenaga kesehatan, saat proses belajar di dalam kelas. Sementara itu, lembaga profesi dapat melakukan standarisasi kompetensi tenaga gizi dan kesehatan melalui akreditasi. Peran yang dapat diambil oleh mitra pembangunan adalah untuk meningkatkan pelaksanaan melalui pembentukan *pilot project* yang akan dijadikan sebagai best practice untuk direplikasi. Selain itu mitra pembangunan juga dapat memberikan bantuan teknis bagi peningkatan kualitas pelaksanaan. Di sisi lain, organisasi kemasyarakatan dapat memperkuat mobilisasi, advokasi, dan komunikasi dan riset serta analisis kebijakan juga pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Peranan pelaku usaha adalah dengan melakukan pengembangan produk pangan bergizi yang dapat diakses masyarakat, menjaga kualitas, distribusi ke berbagai daerah sehingga mudah dijangkau, riset, pengembangan teknologi, komunikasi, serta mendorong perilaku hidup sehat bagi karyawannya.

Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan makanan bergizi yang terjangkau masih sangat sedikit. Di satu sisi, di perkotaan sangat mudah ditemui makanan bergizi untuk anak, namun bagi populasi di pedesaan dengan kuintil kepemilikan rendah tidak ditemukan hal yang sama. Sektor swasta sering kali tidak memilih lokasi dengan tingkat permintaan yang rendah sehingga tidak menyediakan bahan makanan ke lokasi tersebut, sehingga mengakibatkan tidak adanya makanan anak yang berkualitas bagi penduduk yang rentan tersebut. Selain rendahnya permintaan, biaya yang dikeluarkan untuk distribusi sering kali lebih besar ditambah daya beli masyarakatnya rendah, sehingga sektor swasta semakin tidak tertarik untuk menyediakan makanan ke daerah tersebut, walaupun dilakukan harganya sulit lagi terjangkau. Dengan demikian sektor swasta dapat berperan untuk menyediakan

kesempatan untuk membuat makanan bergizi yang terjangkau dan mendorong karyawannya untuk menerapkan pola hidup sehat.

D. Pembiayaan

Penting untuk mengetahui anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program. Dengan demikian dapat diketahui jumlah dana yang diperlukan dan ketersediaan dana sehingga apabila terjadi kekurangan dapat diketahui lebih awal dan direncanakan untuk mencari alternatif pendanaan dari sumber lainnya. Besar dana indikatif untuk program dan kegiatan terdapat pada RPJMD dan Renstra OPD.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Evaluasi

Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi, perlu ditetapkan target atau output yang ingin dicapai, siapa saja yang berperan, apa saja input dan proses yang harus dilakukan. Namun agar lebih terukur dipilih beberapa indikator kinerja utama untuk setiap SKPD yang akan terus dipantau pencapaiannya dalam kurun waktu tertentu. Indikator diperoleh dengan memilih indikator kinerjanya yang berasal dari RPJMD maupun Renstra SKPD atau kegiatan lainnya yang relevan terhadap upaya perbaikan gizi dan berkaitan dengan output dan outcome yang ingin dicapai. Indikator ini akan terus dipantau dan dievaluasi sehingga dapat mendorong tercapainya output dan outcome dari RAD- PG 2020-2024.

B. Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Waktu pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun melalui koordinasi yang difasilitasi oleh BAPPEDA.

C. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Pelaporan dan kegiatan monev dilakukan secara periodik di setiap tahunnya. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing SKPD dan lembaga terkait berkaitan dengan program/kegiatan yang telah dicanangkan dan realisasinya. Beberapa komponen penting yang dimuat dalam pelaporan monev adalah:

1. Pendahuluan
 - a. Tujuan monev
 - b. Permasalahan dan program kerja per tahun dicanangkan
2. Indikator dan capaian masing-masing SKPD
3. Kendala pencapaian sasaran dan mekanisme penyelesaiannya
4. Rencana tindak lanjut dan perencanaan capaian tahun berikutnya
5. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2021*.
- Bantul, B. (2012). *Instruksi Bupati Bantul tentang Penggunaan Bahan Baku Pangan Lokal*. July, 32.
- Elida, E., & Fridayati, L. (2011). Penanggulangan Gizi Buruk Melalui Analisis Sikap Dan Kebiasaan Ibu Dalam Pengaturan Makanan Keluarga. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 6(1), 84. <https://doi.org/10.25182/jgp.2011.6.1.84-89>
- Gropper, Sareen S. Smith, J. L. (2013). Advanced Nutrition and Human Metabolism. In *Advanced Nutrition in Human*.
- Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). *Peraturan Gubernur tentang RAD Pencegahan dan Penanganan Stunting Tahun 2020-2024*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). Pedoman Gizi Seimbang. In *Pedoman Gizi Seimbang*.
- Kementerian Kesehatan RI (2018). *Pedoman Penanganan Gizi dalam Penanggulangan Bencana*. Jakarta.
- Lestari, Lily A., Sari, Puspita M., Utami, Fasty A. (2016). *Kandungan Zat Gizi Makanan Khas Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari*. 1–26.
- Sugianto, Faozan, M., & Setyani, A. (2014). *Studi diet total: Survei Konsumsi Makanan Individu Daerah Istimewa Yogyakarta 2014*. 1–74. http://www.pusat2.litbang.depkes.go.id/pusat2_v1/wp-content/uploads/2015/04/Buku-Studi-Diet-Total-Survei-Konsumsi-Makanan-Individu-DIY-2014.pdf
- Syagata, A. (2019). *Risiko Tinggi Diabetes Mellitus Tipe 2 pada Pegawai Usia Dewasa (High Risk of Type 2 Diabetes Mellitus among Working Adult)*. 3, 52–59.
- ., & Setyani, A. (2014). *Studi diet total: Survei Konsumsi Makanan Individu Daerah Istimewa*

Yogyakarta 2014. 1–74. http://www.pusat2.litbang.depkes.go.id/pusat2_v1/wp-content/uploads/2015/04/Buku-Studi-Diet-Total-Survei-Konsumsi-Makanan-Individu-DIY-2014.pdf

Susetyowati, dkk. (2017). Peranan Gizi dalam Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular. Yogyakarta: UGM Press.

LAMPIRAN 1. Strategi, Aksi, dan Keluaran Penajaman Program Pangan dan Gizi tahun 2020-2024

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Tujuan Strategis 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman													
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Luas sentra produksi pangan lokal (tanaman pangan) Budidaya Ubikayu, Budidaya Garut	Ha	300	350	375	400	0	85,166	85,166	85,166	DPKP
			Jumlah sentra produksi pangan komoditas unggulan kelompok pangan hewani (ternak)	lokasi	4	4	4	4	10.5387	18.351	19.990	21.790	DPKP
		Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Jumlah sentra produksi pangan komoditas unggulan kelompok pangan hortikultura (Sayur dan buah)	lokasi	20	22	24	26	493	308	465,6	504,4	DPKP
				lokasi (salak dan bawang merah)	3	3	3	3	450	450	450	450	BPTP
			Jumlah sentra produksi pangan komoditas unggulan kelompok hewani (ikan)	lokasi	49	49	49	49	3.248,8	2.306,7	2.350	2.400	DKP
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan	Persentase kenaikan produksi ikan konsumsi	persen	0,50	0,52	0,54	0,57	7.761,4	3,180,1	3.250	3.300	DKP
			Persentase kenaikan produksi sayur	persen	4	4	4	4	24,7	14	19,4	19,4	DPKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		lokal di setiap kab/kota	Persentase kenaikan produksi buah	persen	4	4	4	4	24,7	14	19,4	19,4	
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota	Persentase kenaikan produksi daging ternak (daging sapi, daging ayam)	persen	5	6	7	8	7.826	13.513	14.864	16.351	
			Persentase kenaikan produksi telur	persen	4	5	6	7	550	690	759	835	
			Persentase kenaikan produksi susu	persen	0,38	0,39	0,40	0,41	141	2.132	2.345	2.580	
			Persentase kenaikan produksi tanaman pangan (beras, ubi kayu, ubi jalar, sorghum, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau)	persen	1	1	1	1	17,8	17,9	18,1	18,2	
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan	Persentase desa/kelurahan fokus lokasi penurunan stunting yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan.	Persen (dari 40 lokus di DIY)	25	25	25	25	246,5	140	194	194	DPKP
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan	Persen (dari 10 lokus di Kota Yk)	50	50	50	50	205,8	205,8	205,8	205,8	DPKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
			dengan membangun demplot urban farming										
		Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat	Jumlah kab/kota yang melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebun bibit daerah (KBD) secara konsisten untuk keberlanjutan kegiatan pemanfaatan pekarangan.	Kab/Kota	5	5	5	5	50	50	50	50	DPKP
									50	50	50	50	BPTP
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan di desa lokus penurunan <i>stunting</i> atau menerapkan <i>urban farming</i> .	KWT	10	10	10	10	246,5	140	194	194	DPKP
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam	Meningkatkan kerja sama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya	Jumlah kabupaten/kota yang telah membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kab/kota dan	Kab/kota	3	2	1	1	45	30	15	15	BPPOM

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	proses produksi);	dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	memiliki program Pengawasan Keamanan Pangan Daerah di <i>retailer</i> dan pasar tradisional										
			Jumlah desa/kelurahan yang menerima intervensi program desa pangan aman	Desa	8	7	8	7	602,9	663,2	729,5	802,4	BPPOM
		Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan	persen	80	80,1	80,2	80,3	140	140	140	140	DPKP
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan	Persentase pangan segar asal hewan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan	persen	80	81	82	83	60	63	65	70	DPKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka keamanan pangan asal ikan	Persentase pangan segar asal ikan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan	persen	78	78	79	79	24	25	30	35	DKP
		Penguatan kapasitas industri olahan pangan skala kecil dalam rangka penjaminan keamanan pangan dan peningkatan kandungan gizi produk pangan olahan	Jumlah industri olahan pangan skala kecil/UMKM yang mendapatkan pelatihan dalam rangka menjamin keamanan pangan	UKM	465	300	300	300	426,25	275	275	275	Diskop dan UKM
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kab/kota	Persentase kenaikan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota	persen	20	20	20	20	124,25	136,675	149,1	161,525	DPKP
			Persentase kenaikan cadangan pangan masyarakat	persen	10	10	10	10	47,050	51,75	56,45	61,15	DPKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	daerah, dan masyarakat	Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)	Persentase desa waspada dan rawan pangan yang mengembangkan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes)	persen	0	0	30	30	0	0	600	600	DPKP
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (<i>food loss</i>)	Mengembangkan pertanian modern (<i>smart farming</i>) untuk mengurangi <i>food loss</i>	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan/sosialisasi untuk mengurangi <i>food loss</i> /kehilangan hasil saat panen	kelompok			5	5			100	100	DPKP
		Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan/sosialisasi untuk mengakses informasi mengenai harga komoditas pangan	Paket data	3	3	3	3	150	155	160	165	DPKP
			Jumlah penyuluh yang mendapatkan pendampingan/ sosialisasi kalender tanam	lokasi BPP	2	2	2	2	50	50	50	50	BPTP
		Melakukan pendampingan pemanfaatan	Jumlah industri olahan pangan skala kecil/UMKM yang mendapatkan pelatihan	UMKM	-	30	30	30		42,5	42,5	42,5	Diskop dan UKM

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		limbah olahan makanan	inovasi produk pangan yang beragam dalam rangka pengendalian <i>food loss</i>										
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i>	Tersedianya data <i>food loss</i> (pangan tercecer) setiap tahun	persen	100	100	100	100	25	25	30	30	DPKP
1.5	Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan	Jumlah komoditi pangan pokok (selain padi) yang diberikan biofortifikasi	Purwarupa produk		1	1	1		100	100	100	LIPI
Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman													
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif	Jumlah operasi pasar yang dilakukan untuk menjaga pasokan dan pengendalian harga	kali	beras : 3 kali	beras : 3 kali	beras : 3 kali	beras : 3 kali	Beras 35 Ton.	20 Ton: 37,9	50 Ton: 70	50 Ton : 70	Disperindag

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab	
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
		terpantau dan terlaporkan			s lain: 2 kali	s lain: 2 kali	s lain: 2 kali	s lain: 2 kali	lain15 Ton 63,9					
			Jumlah lembaga Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang difasilitasi untuk stabilisasi harga	Gapoktan/k elompok	46	48	50	52	900	1000	1100	1200	DPKP	
			Jumlah gelar pangan murah/bazar untuk menjaga pasokan dan pengendalian harga melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog	kali	25	28	30	30	75	84	90	90	Bulog	
			Jumlah pemantauan ketersediaan dan harga yang dimanfaatkan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan pokok/strategis di tingkat produsen dan konsumen	kali	12	12	12	12	63,9	63,9	63,9	63,9	Disperin dag	
			Persentase kabupaten/kota yang memiliki sistem informasi pemantauan harga	persen	100	100	100	100	127,8	51,6	56,8	62,5	Disperin dag	

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
			dan pasokan komoditas pangan pokok/strategis										
		Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal	Jumlah Toko Tani Indonesia/Pasar Mitra Tani (PMT) yang menyediakan dan menjual komoditi pangan sumber protein hewani/nabati, buah, sayur dan pangan lokal	Toko	230	235	240	245	362,5	398,75	435	471,25	DPKP
			Jumlah Rumah Pangan Kita yang menyediakan dan menjual komoditi pangan sumber protein hewani/nabati, buah, sayur dan pangan lokal	RPK	40	40	50	50	2.340	2.574	2.831	3.114	Bulog
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Tersedianya data/informasi prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan daerah	persen	80	85	90	95	197,78	217,56	237,34	257,12	DPKP
		Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut	Jumlah komoditas pangan pokok/strategis sayur dan buah yang dipantau dalam	Komoditas	12	12	12	12	161,75	273,32	289,52	305,72	DPKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		dipantau dalam panel harga pangan	sistem informasi harga pangan										
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;	Membina UMKM dan Koperasi Pertanian dalam pengembangan usaha untuk mendukung ketahanan pangan melalui rantai pasok untuk menghindari kelangkaan pangan	Persentase UMKM/Koperasi sektor pangan yang dibina untuk menjaga keterjangkauan dan ketersediaan pangan untuk keperluan masyarakat	Koperasi	-	20	20	20	-	25	25	25	Diskop
2.4	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras bifortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)	Jumlah beras fortifikasi atau biofortifikasi yang tersedia sebagai salah satu bahan pangan untuk program BPNT	Kg	3,222 8.910	3.228 .910	3.228 .910	3.228 .910	26.799	26.79 9	26.79 9	26.79 9	Dinsos

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Kartu Sembako/BPNT	Jumlah e-warong yang menyediakan jenis pangan yang beragam sesuai dengan Pedum	e-warong	1.264	1.264	1.264	1.264	773.493	773.493	773.493	773.493	Dinsos
		Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)	Jumlah e-warong yang menyediakan suplemen gizi dalam program bantuan sosial untuk kelompok marginal (perempuan, gelandangan, fakir miskin, anak jalanan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)	e-warong	1.264	1.264	1.264	1.264	773.493	773.493	773.493	773.493	Dinsos

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		Melakukan peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) Akseptor KB Mandiri Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Lestari MKJP	Jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan dan atau di Kampung Percontohan Lain yang mendapat fasilitasi dan pembinaan PEK	kelompok	5	10	15	20	100	125	150	175	BKKBN
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan <i>supplier</i> bahan pangan lokal di daerah masing-masing	Persentase Kab/Kota penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang menyerap produk pangan yang berasal dari dalam DIY	persen	100	100	100	100	99,5	109,5	120,4	132,4	DPKP
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam penguatan ketahanan pangan	Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk Tikar Pertumbuhan sebagai media edukasi dan deteksi dini stunting	persen	71,42	71,94	72,96	73,98	4	4	5	5	Biro Bermas (indikator dalam Pergub 92/2020 tentang

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	terdampak bencana;	dan pencegahan stunting	Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi baduta dan balita	persen	48,21	48,98	49,74	51,02					Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024)
		Mendampingi daerah rentan pangan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Persentase desa mandiri pangan dalam tahap kemandirian	persen	75	76	77	78	80	80	90	90	DPKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
2.7	Pengembangan sistem logistik pangan	Mengembangkan sistem logistik pangan melalui penguatan <i>supply chain ecosystem</i> berdasarkan kondisi daerah	Tersedianya sistem informasi ketersediaan dan harga pangan untuk mendukung sistem distribusi pangan	Sistem informasi		1				95			Biro APSDA
Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)													
3.1	penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah beserta pemanfaatannya	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan analisis dan memanfaatkan data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Kab/Kota	5	5	5	5	80	80	80	80	DPKP
			Jumlah kab/kota yang menyediakan dan menggunakan data skor PPH ketersediaan	Kab/Kota	5	5	5	5	27,5	27,5	27,5	27,5	DPKP
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun;	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan	Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan dalam pemanfaatan informasi peta rawan pangan untuk pengembangan kebijakan	Kab/Kota	100	100	100	100	28,46	28,46	28,46	28,46	DPKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
			ketahanan pangan di kabupaten/kota										
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;	Meningkatkan kegiatan advokasi penganekearagaman konsumsi pangan	Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekearagaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Lokasi	5	5	5	5	50	50	50	50	DPKP
		Melakukan kerjasama dengan <i>influencer</i> , tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku	Jumlah kampanye digital yang dilakukan <i>influencer</i> /tokoh masyarakat/agama/politik/sel ebgram lokal untuk perubahan perilaku makan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Kali	1	1	1	1	20	20	20	20	DPKP
			Jumlah lokasi sosialisasi perilaku makan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Lokasi	5	5	5	5	50	50	50	50	DPKP
		Melakukan pengutamakan kampanye gerakan	Jumlah orang yang mengikuti KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) gerakan gemar makan ikan (gemarikan)	orang	3.390	2.580	3.450	3.450	732,9	829,9	850	875	DKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		makan ikan (gemarikan)	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan pengolahan ikan	orang	1.925	1.250	2.500	2.500	481,2	634,2	650	675	DKP
		Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan	Tersusunnya dokumen integrasi konteks pangan dan gizi ke Kompetensi Dasar di seluruh mata pelajaran	dokumen	5	10	15	18					Dikpora
			Tersusunnya dokumen KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di seluruh sekolah SMA/SMK dan SLB yang memuat konteks pangan dan gizi	dokumen	5	10	15	18					Dikpora
			Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terintegrasi dengan UKS, sekolah Adiwiyata, dan sekolah ramah anak (mengintegrasikan materi kependudukan dengan mata pelajaran)	SSK	25	30	35	40	105	122.5	140	157.5	BKKBN

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	Jumlah kampanye gizi seimbang di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi	kali	10	15	17	20	5	30	30	30	Dinkes
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan	Jumlah petugas kesehatan yang pernah mendapat pelatihan/pendampingan komunikasi perubahan perilaku antar individu.	orang	7	16	25	35	5	37,5	37,5	37,5	Dinkes

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		penerima manfaat menjadi 90											
		Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita Anak (BKB) yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan yang B2SA	kelompok	125	230	330	438	125	150	175	200	BKKBN
			Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan yang B2SA	kelompok	125	230	330	438	125	150	175	200	BKKBN
			Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan yang B2SA	kelompok	125	230	330	438	125	150	175	200	BKKBN
			Jumlah Kelompok Pusat Infomasi dan Konseling Remaja (PIKR) yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan yang B2SA	kelompok	78	156	234	312	100	125	150	175	BKKBN

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Jumlah kampanye yang melibatkan lintas sektor dan mitra kesehatan dalam rangka pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini.	kali	10	15	17	20	30	30	30	30	Dinkes
		Melakukan <i>orientasi agent of change</i> pencegahan penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah orang yang sudah mengikuti orientasi agent of change PTM untuk pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat dan aktivitas fisik.	orang	0	20	40	60	5	45	45	45	Dinkes
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan nilai gizi dalam label kemasan pada UMKM pangan olahan	Jumlah UMKM yang mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING) dalam label kemasan sesuai peraturan BPOM No. 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk pangan olahan yang diproduksi oleh UMKM.	UMKM	20	20	20	20	27,5	27,5	27,5	27,5	Diskop dan UKM

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Jumlah sosialisasi tentang Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Sekolah	24	20	22	20	75,4	82,9	91,2	100,2	BBPOM
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok	Perluasan cakupan kelompok sasaran siklus hidup dan rentan pangan yang terpenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral	Pembiasaan mengkonsumsi makanan sehat dengan memberikan makanan tambahan untuk siswa SLB dan SMA/SMK	orang	300	600	900	1200					Dikpora

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	rentan rawan pangan												
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal	Cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 6 bulan di Kabupaten/Kota	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	persen	45	50	55	60	3	3	3	3	Dinkes
			Cakupan bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	persen	40	45	50	55	3	3	3	3	Dinkes
		Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal	Cakupan Balita Gizi Kurang yang Mendapat Makanan Tambahan	persen	85	85	85	85	629	630	635	640	Dinkes
			Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang	persen	80	80	80	80	1.819	1.850	1.855	1.860	Dinkes

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
			Mendapat Makanan Tambahan										
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 pada tahun 2024	Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat Kapsul Vitamin A.	persen	87	88	89	90	3	3	3	3	Dinkes
			Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	persen	81	82	83	84	3	3	3	3	Dinkes
			Cakupan Remaja Putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	persen	52	54	56	58	3	3	3	3	Dinkes
			Cakupan Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vitamin A	persen	73	76	76	79	3	3	3	3	Dinkes
			Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat	dokumen	2	3	4	5	3	3	3	3	Dinkes
			Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan	persen	20	40	60	80	45	45	45	45	Dinkes

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		pelayanan terpadu (Pandu) PTM	tatalaksana pandu PTM berdasarkan algoritma pandu PTM dan Puskesmas melakukan pendampingan saat pelaksanaan Posbindu)										
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa	Persentase kabupaten/kota yang puskesmasnya melakukan pendampingan desa untuk kegiatan Posbindu	persen	25	50	75	80	2,5	15	15	15	Dinkes
			Persentase obesitas usia ≥ 15 tahun yang dilaksanakan pengukuran deteksi dini PTM	persen	10	25	30	50	2,5	15	15	15	Dinkes
		Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta) terdampak pandemi COVID-19	Jumlah kegiatan sosialisasi/pembinaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif pada perusahaan/sektor swasta	kegiatan	21	25	25	25	3	3	3	3	Dinkes
		Menginisiasi gerakan masyarakat	Jumlah pelatihan pengelolaan sampah organik mandiri bagi masyarakat	Kali	20	5	5	5	198,66 0	995,, 178	1.250	1.750	DLHK

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		mengurangi <i>food waste</i>	Sosialisasi pengurangan sampah (Gerakan bersih sungai)	Kali	0	9	10	15					
			Pembinaan pengelolaan sampah kabupaten/kota	Kab/kota	5	5	5	5					
		Meningkatkan penyehatan lingkungan dan penerapan pola hidup masyarakat	Persentase Kalurahan/kelurahan yang telah mengimplementasikan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	persen	41	41.5	42	42.5	3	3	3	3	Dinkes
			Jumlah Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	sekolah	2365	2958	2958	2958	3,2	3,2	3,2	3,2	Dinkes
			Jumlah Kelompok Masyarakat penerima bantuan Hibah Sarana Prasarana Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pedesaan	Kelompok Masyarakat	5	5	5	5	1.000	1.000	1.000	1.000	DPUP
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditingkatkan kualitasnya	persen	43,10	53,78	64,46	75,14	68.895	65.884	70.000	70.000	DPUP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh Tim Penggerak PKK	Desa/ Kelurahan	91	93	95	97	5	5	5	5	PKK/ Biro Bermas (indikat or dalam Pergub 92/2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencega han dan Penanga nan Stunting Daerah Istimew a Yogyaka rta Tahun 2020 – 2024)

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
3.9	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas K/L/D dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi	Jumlah kab/kota yang mengimplementasikan pengawasan terhadap NSPK SNI wajib tepung terigu, minyak goreng sawit, dan garam konsumsi	Kab/kota	5	5	5	5	6,8	11,2	15	15	Disperindag
		Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku	Persentase produk minyak goreng sawit terdaftar yang beredar dan mengandung vit A dan/ atau pro Vitamin A	persen	100	100	100	100	2,4	2,6	2,8	3	BPOM
			Persentase tepung terigu terdaftar yang beredar dan mengandung fortifikan sesuai persyaratan	persen	100	100	100	100	2,4	2,6	2,8	3	BPOM
			Persentase garam konsumsi terdaftar yang beredar dan mengandung fortifikan sesuai persyaratan	persen	72	80	90	95	2,4	2,6	2,8	3	BPOM
3.10	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.	Mendorong peningkatan produk pangan	Jumlah unit usaha teregister PD, PH dan tersertifikat prima	Unit	5	5	5	5	70	70	70	70	DPKP
			Jumlah unit usaha tersertifikat MD	UMKM	30	30	30	30	80	100	100	120	BBPOM

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		segar dan pangan olahan bersertifikat	Jumlah sertifikat/izin terkait keamanan pangan bagi UMKM produk olahan pangan yang mendapatkan fasilitasi perizinan dari instansi terkait	Sertifikat/izin PIRT	90	90	90	90	90	90	90	90	Diskop dan UKM
Tujuan Strategis 4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi													
4.1	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan <i>stunting</i>	Jumlah kegiatan koordinasi pembangunan pangan dan gizi lintas sektor/pemangku kepentingan	kegiatan	1	1	1	1	5,9	3,8	5	5	Bappeda
		Memperkuat peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-	Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan RAD-PG sesuai pedoman terkini	persen		60	100	Bappeda					

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		PG di Provinsi dan Kabupaten/Kota											
4.2	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dengan mitra lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi.	kegiatan	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	Dinkes
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan, dan masyarakat untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi	Jumlah lokasi pendampingan/KIE (komunikasi, informasi, edukasi) yang dilakukan oleh perusahaan/swasta mengenai konsumsi masyarakat/urban farming/gizi/kesehatan masyarakat										Perusahaan Swasta
			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan sampah	Usaha/ Kegiatan	0	10	15	20	199,66 0	995,1 78	1.250	1.375	DLHK

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		masyarakat, <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> .	Edukasi masyarakat terkait penyiapan makanan, penyimpanan makanan, pengaturan porsi makan dan pengelolaan <i>food waste</i> sesuai kaidah keamanan dan mutu pangan	Kab/Kota	5	5	5	5	50	60	60	60	DPKP
			Kampanye menghargai panen dengan budaya	Kab/Kota	5	5	5	5	50	60	60	60	DPKP
4.3	Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Jumlah pendampingan/pelatihan PUG/PURG bagi OPD bidang ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan	OPD/Instansi	20	20	34	34	20	20	30	30	DP3AP2
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Jumlah pendampingan terhadap lembaga masyarakat terkait PUG dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak)	lembaga	4	4	4	4	40	40	50	50	DP3AP2

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini	Jumlah organisasi perempuan (kabupaten/kota) yang mendapatkan pelatihan dalam implementasi gerakan masyarakat hidup sehat untuk mengendalikan obesitas dan PTM	Organisasi	1	2	3	4	2,5	2,5	2,5	2,5	Dinkes
		Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku	Evaluasi terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku dengan melibatkan organisasi perempuan, organisasi masyarakat dan media	Kali	1	2	2	2	0,75	3,1	3,1	3,1	Biro Bina Mental Spiritual
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait	Jumlah kabupaten yang menetapkan Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Kabupaten		4			1				DPKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	pangan dan gizi	lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Jumlah kabupaten yang menetapkan regulasi turunan dari Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Kabupaten			4			1			DPKP
		Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, <i>acceptibilitas</i> , harga, <i>shelf live</i>) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi	Jumlah publikasi penelitian mengenai produk inovasi pangan yang layak untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi	buah	2	2	2	2	150	150	150	150	LIPI
4.5	Pengembangan <i>platform</i> penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> termasuk inovasi <i>smart farming</i>	Jumlah publikasi penelitian mengenai inovasi <i>smart farming</i> dalam mencegah <i>food loss</i> yang dapat diadopsi menjadi program pemerintah	buah	1	1	1	1	100	100	100	100	LIPI
			Kajian pencegahan serta penanganan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i>	paket			1				100		DPKP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		Pelaksanaan penelitian trans disiplin dan/atau lintas institusi terkait pencegahan dan penangana stunting pada perguruan tinggi di DIY	Terlaksananya penelitian trans disiplin dan/atau trans institusi terkait pencegahan dan penanganan stunting	kegiatan	2	4	4	4					Perguruan Tinggi (UGM) (indikator dalam Pergub 92/2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024)

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemberian suplementasi zat gizi mikro	dokumen	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	Dinkes
		Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan	Jumlah publikasi riset ilmiah biofortifikasi di berbagai komoditi pangan (selain padi)	buah	1	2	2	2	75	150	150	150	LIPI
		Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	Jumlah hasil riset produk inovasi pemanfaatan pangan lokal yang diterapkan untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	buah	1	1	2	2	100	100	200	200	LIPI
			Jumlah publikasi riset ilmiah untuk mendukung produksi RUTF dalam negeri berbahan dasar lokal	buah	1	1	2	2	100	100	200	200	LIPI

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target				Anggaran (dalam juta Rupiah)				OPD/ Instansi Penang gungja wab
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah <i>stunting</i> yang sudah beredar	Jumlah kegiatan diseminasi/ekspose hasil penelitian gizi dan kesehatan	kegiatan	1	1	1	1	2,5	2,5	2,5	2,5	Dinkes

LAMPIRAN 2. Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi di Pusat yang dapat diacu oleh Pemerintah Daerah

Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi di Pusat yang Dapat Diacu oleh
Pemerintah Daerah

No	Indikator	<i>Baseline</i>	Target 2024
<i>Intermediate outcome</i>			
1	Skor Pola Pangan Harapan	86,4 b)	95,2
2	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	2.121 b)	2.100
3	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	62,9 b)	57
4	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>)	6,7 b)	5
5	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (<i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i>)	5,8 b)	4
6	Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	50,7 c)	62
7	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	13,2 b)	14,6
8	Konsumsi protein asal ternak (gram/ kapita/hari)	10,9 b)	11
9	Konsumsi sayur dan buah (gram/ kapita/hari)	244,3 b)	316,3
10	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	94 a) *)	85-95
11	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (%)	48 ton **)	100% penerima BPNT

	Penerima BPNT)		
12	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76 (BPOM, 2019)	86
<i>Outcome</i>			
13	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGB, 2019)	14
14	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Riskesdas, 2018)	7
15	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,8 (Riskesdas, 2018)	21,8

Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Keterangan :

*) Hasil uji dengan sampel yang relatif kecil; jumlah sampel akan diperbesar sehingga dilakukan penyesuaian angka target

**) Uji coba beras fortifikasi

a) Capaian tahun 2018;

b) Prognosa/estimasi tahun 2019;

c) Capaian tiga triwulan pertama tahun 2019